

**LAPORAN PENELITIAN**

**ANALISIS KETERPILIHAN DENTY DALAM  
PEMILU DPD RI 2014**



**Oleh :**

**Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si  
NIDN: 0022046308**

**Dibiayai dari Sumber Dana DIPA FISIP UNDIP  
Tahun Anggaran 2014**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pemilukada Dalam Pandangan Politik Wong Cilik Kota Semarang
2. Kategori Tema : Otonomi Daerah dan Desentralisasi
3. Bidang Ilmu : Ilmu Politik dan Pemerintahan
4. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si.
  - b. NIP/NIDN : 196304221989032001 / 0022046308
  - c. Jabatan Fungsional dan Golongan : Lektor dan III/c
  - d. Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Pemerintahan
  - e. Alamat dan No. Telp. Kantor : Jl Prof. Sudarto, SH, Kampus Tembalang, Semarang, Telp. 024 7465405
  - f. Alamat dan No Telp. Rumah : Jl. Tlogosari I No. 44 A, RT 01/RW 01, Bulusan, Tembalang, Kota Semarang. Telp. 08156641333
5. Lokasi Penelitian : Kota Semarang
6. Lama Penelitian : 4 (empat) bulan
7. Paket Penelitian : 3 (Tiga)
8. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 7.400.000,00 (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
9. Sumber Dana : DIPA FISIP UNDIP Tahun Anggaran 2015

Semarang, 06 April 2015

**Ketua Peneliti,**

**Pejabat Pembuat Komitmen,**

**Dra.Rr.Hermeni Susiatiningsih, M.Si**  
**NIP. 196304221989032001**

**Drs. Handojo Djoko W, M.Si**  
**NIP. 195801171987101001**

**Menyetujui,**  
**Dekan,**

**Dr. Sunarto, M.Si**  
**NIP. 196607271992031001**

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Setelah rakyat tidak berdaya atas kekuasaan Orde Baru dibawah regim Soeharto, maka Reformasi Tahun 1998 telah berhasil menggulingkan pemerintahan otoriter selama 32 tahun dan menggantikannya dengan pemerintahan yang demokratis yang diwujudkan dengan memberikan ruang, waktu dan kesempatan yang besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam negara demokratis adalah mutlak harus dihadirkan, karena alasan sebagaimana frasa terkenal yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, yaitu "*government of the people, by the people, for the people*". Refleksi pernyataan Lincoln tersebut diwujudkan oleh Indonesia dengan dilaksanakannya beberapa macam pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, dengan melibatkan rakyat secara langsung untuk memilih aktor atau elite yang akan memimpin negeri ini. Berbagai macam pemilihan umum tersebut adalah Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, Pemilu Gubernur, Pemilu Bupati, Pemilu Walikota dan pada tingkat paling bawah dari level pemerintahan di Indonesia adalah Pemilu Kepala Desa.

Pada Pemilu Legislatif akan dihasilkan elite yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan yang terbentuk bisa berbeda-beda dari satu negara dengan negara lainnya. Hal ini tentu berkaitan dengan sistem parlemen yang diterapkan pada negara-negara yang bersangkutan. Indonesia meniru sistem parlemen bikameral yang diterapkan Amerika Serikat sebagai salah satu sistem parlemen yang dipandang telah lama berkembang dengan baik. Oleh sebab itu, Pemilu Legislatif tingkat nasional diprogram untuk menghasilkan dua jenis institusi perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Salah satu perbedaan diantara keduanya adalah pada keterwakilannya, yaitu jika DPR merupakan *political representative*, maka DPD adalah *regional representative*.

DPD lahir dan hasil dari gerakan reformasi 1998. Namun demikian keberadaan DPD ini sebenarnya adalah menggantikan Utusan Daerah, yang merupakan salah satu unsur dari lembaga perwakilan rakyat era Orde Baru, disamping unsur Golongan dan partai politik. Pada masa lalu, kekuatan Orde Baru menjadikan Utusan Daerah lebih merupakan rekayasa politik Orde Baru dalam melanggengkan kekuasaannya. Dengan kata lain lembaga tersebut bukan merepresentasikan kepentingan rakyat dalam suatu wilayah tertentu sebagaimana nama yang diberikan, namun merupakan kepentingan penguasa. Oleh sebab itu lahirnya DPD merupakan terobosan baru bagi kehidupan yang lebih demokrasi di Indonesia, dimana rakyat di aras lokal dilibatkan secara langsung melalui Pemilu Legislatif dalam menentukan siapa aktor yang akan duduk di lembaga terhormat

untuk mewakili, membawa dan memenuhi aspirasi, kebutuhan dan harapan-harapan mereka.

Pemilu DPD diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 2004 bersamaan dengan Pemilu DPR dalam satu paket pemilu yang disebut Pemilu Legislatif. Dengan demikian Pemilu Legislatif yang terselenggara 9 April 2014 merupakan Pemilu DPD untuk ke tiga kalinya. Pemilu Legislatif DPD 2014 Propinsi Jawa Tengah menghasilkan data perolehan suara tertinggi yang terpilih untuk menduduki kursi DPD untuk periode 2014 – 2019 adalah sebagaimana disampaikan dalam bentuk tabel berikut ini.

**Tabel 1****Sekilas Profil Calon Legislatif DPD dan Perolehan Suara dalam Pemilu Legislatif 2014 Propinsi Jawa Tengah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>            | <b>Asal Daerah</b> | <b>Riwayat Pekerjaan/Profesi/Organisasi</b>  | <b>Jumlah Suara</b> |
|------------|------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 1.         | Denty Eka Widi Pratiwi | Temanggung         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Karyawan JPKM Kabupaten Temanggung (1998 – 2001)</li><li>• Karyawan Yayasan Al-Kautsar (2006 – 2008)</li><li>• Waket Panwas Pemilu Gubernur Jateng dan Bupati Temanggung, 2008</li><li>• Anggota DPD Periode 2009 - 2014</li></ul> | 1.901.163           |
| 2.         | Bambang Sadono         | Kota Semarang      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wartawan</li><li>• Mantan petinggi DPD Golkar Jateng,</li><li>• Anggota DPR RI (2004 – 2009)</li><li>• Wakil Ketua DPRD Jateng (2009 – 2014)</li></ul>   | 1.235.682           |
| 3.         | Sulistyo               | Kota Semarang      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sekretaris Umum Pengurus PGRI Jateng (1999 – 2009)</li><li>• Ketua Umum Pengurus Besar PGRI (2008 – 2013)</li><li>• Anggota DPD Periode 2009 - 2014</li></ul>  | 1.246.129           |
| 4.         | Akhmad Muqowam         | Jakarta Timur      | <ul style="list-style-type: none"><li>• KNPI</li><li>• PPP</li><li>• Anggota DPR RI Periode 2007 – 2009 dan 2009 – 2014</li></ul>  | 948.673             |

Sumber: KPU Jateng 2014, diolah

Mencermati data pada Tabel 1 di atas, terdapat hal yang menarik di Pemilu DPD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2014 kali ini, yaitu kemenangan dengan perolehan jumlah suara yang sangat fantastis yang diperoleh oleh Denty Eka Widi Pratiwi, yaitu 1.901.163 suara. Semakin tidak logis tingginya perolehan suara tersebut didapatkannya mengingat dia bukanlah kandidat yang memiliki massa sebagaimana 3 (tiga) kandidat DPD lainnya. Dua kandidat DPD periode 2014 ini berasal dari elite partai politik, yaitu Bambang Sadono dan Akhmad Muqowam. Bambang Sadono yang meniti kariernya sebagai wartawan, kemudian menjadi anggota hingga memegang jabatan tertinggi di DPD Golkar Jawa Tengah yang berhasil mengantarkannya ke Senayan sebagai anggota DPR RI dan juga sebagai wakil ketua DPRD Jateng, menjadi patut untuk diduga bahwa perolehan suara yang tinggi dalam Pemilu Legislatif DPD ini adalah karena kepemilikan dan dukungan massa Golkar yang kuat. Kondisi menguntungkan serupa juga dimiliki oleh Akhmad Muqowam sebagai kandidat DPD yang mempunyai modal kepemilikan dan dukungan dari massa organisasi kemasyarakatan, pemuda serta partai politik yang berbasis Islam, yang telah membesarkan karier politiknya selama ini, yaitu PPP. Dengan jenis massa yang bukan berbasis politik, Sulistyono mendapat perolehan suara yang tinggi pula karena kepemilikan massa dan dukungan dari organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian maka ketiga kandidat DPD ini menjadi realistis jika mendapatkan perolehan suara yang tinggi.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, memunculkan berbagai pertanyaan tentang keterpilihan Denty dengan mendulang suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif DPD 2014 Propinsi Jawa Tengah. Bagaimana dia yang tidak memiliki massa bisa mendapatkan perolehan jumlah suara yang jauh dari jumlah yang didapatkan oleh 3 (tiga) kandidat lain yang memiliki dan secara logika mendapatkan dukungan massa? Strategi apa dan bagaimana yang dilakukan sehingga perolehan jumlah suara yang dicapai begitu sangat fantastis? Faktor-faktor apakah yang menjadi dorongan kuatnya suara yang dia peroleh? Apa dan bagaimanakah perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif DPD 2014? Menariknya untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan atas keterpilihan Denty sebagai kandidat terpilih untuk menduduki kursi DPD yang kedua kalinya ini, menjadi alasan penulis untuk mengangkat fenomena ini kedalam sebuah penelitian tentang keterpilihan Denty Eka Widi Pratiwi dalam Pemilu Legislatif DPD-RI, 2014.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah yang menghasilkan adanya beberapa pertanyaan yang menggelitik dan menarik untuk dicari jawabannya, mendasari pengambilan dan pembentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah keterpilihan Denty Eka Widi Pratiwi dalam Pemilu Legislatif DPD-RI 2014.

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban yang obyektif dan akurat mengenai keterpilihan Denty Eka Widi Pratiwi dalam Pemilu Legislatif DPD-RI 2014.

### **1.4 KONTRIBUSI PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan akan memiliki kontribusi dalam hal bagaimana keterpilihan Denty Eka Widi Pratiwi dalam Pemilu Legislatif DPD-RI .

### **1.5 LUARAN PENELITIAN**

Luaran penelitian ini adalah publikasi ilmiah pada jurnal nasional belum terakreditasi.

### **1.6 TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.6.1 Sistem Demokrasi Perwakilan**

Pada awalnya, yaitu di Negara Kota Athena pada zaman Yunani Kuno, keterlibatan rakyat dalam proses penentuan kebijakan pemerintah dilakukan secara langsung. Pada era modern saat ini, cara atau model demokrasi (langsung) seperti ini sudah tidak praktis atau tidak memungkinkan untuk diterapkan lagi. Hal ini disebabkan bahwa di era modern ini, negara memiliki jumlah penduduk yang relatif cukup besar sehingga keterlibatan warga negara secara langsung

dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menemukan kesulitan dan hampir dapat dipastikan tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Kelemahan dari demokrasi ini kemudian melahirkan aliran demokrasi baru yang dikenal dengan istilah *New Democracy*, *Modern Democracy* dan *Representative Democracy* .

*Representative Democracy* (Demokrasi Perwakilan) dicirikan dengan adanya 3 institusi demokrasi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu Pemilu, Partai Politik dan Badan Perwakilan Rakyat.

### **1.6.2 Lembaga Perwakilan dan Peran Politikanya**

Paham demokrasi muncul sebagai respon perlawanan dari adanya kekuasaan yang bersifat absolut, terpusat dan otoriter. John Locke, Immanuel Kant dan Montesquieu secara terpisah melahirkan teori kenegaraan tentang bagaimana perlunya *separation of power* sebagai jawaban atas persoalan pemusatan dan kesewenang-wenangan negara atau penguasa dalam mengelola kehidupan manusia. Teori tersebut dikenal dengan nama Trias Politica. Dalam teori ini, kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

Terkait dengan kekuasaan legislatif yang dikelola oleh lembaga atau badan perwakilan rakyat yang terbentuk melalui mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan sebagai representasi keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah (khususnya di bidang legislasi dan pengawasan), maka sifat keterwakilan yang bermakna bahwa keberadaan dan kekuasaan yang dimiliki lembaga tersebut merupakan amanat yang diberikan oleh rakyat, dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya, lembaga tersebut harus berdasarkan dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat, khususnya konstituennya.

Berbicara tentang demokrasi modern, tidak dapat lepas dari pembicaraan tidak saja terkait dengan lembaga perwakilan tetapi juga sistem perwakilannya. Secara teoritis perwakilan pada dasarnya adalah konsep hubungan antara individu-individu, yaitu antara pihak yang diwakili dengan pihak yang mewakili. Pihak yang mewakili memiliki sederajat kewenangan. Perwakilan merupakan proses hubungan manusia dimana seseorang tidak hadir secara fisik tapi tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dilakukan oleh orang yang mewakilinya.<sup>1</sup>

Perwakilan politik adalah individu atau kelompok orang yang dipercayai memiliki kemampuan dan berkewajiban untuk bertindak dan berbicara atas nama satu kelompok orang yang lebih besar. Dengan demikian indikator yang bisa digunakan untuk melihat apakah seorang wakil dinilai representatif oleh orang yang mewakilinya adalah:<sup>2</sup>

- a. Memiliki ciri yang sama dengan konstituen (pemilih)
- b. Memiliki ekspresi emosi yang sama dengan emosi konstituen
- c. Intensitas komunikasi yang tinggi dengan konstituen

---

<sup>1</sup> Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. 1985 hlm. 54

<sup>2</sup> Arbi Sanit dalam Syarif Karim, "Fenomena Perwakilan Politik Di Indonesia, Minggu 31 Oktober 2010, diunduh tanggal 20 April 2012, jam 10.00

Dalam hal yang sama, Sartori mengemukakan 7 (tujuh) kondisi yang mengindikasikan telah terwujudnya perwakilan politik dalam mekanisme pemerintahan:<sup>3</sup>

1. Rakyat secara bebas dan periodik memilih wakil rakyat (*The people freely and periodically elect a body of representative*).
2. Pemerintah bertanggungjawab kepada pemilih (*The governors are accountable or responsible to the governed*).
3. Rakyat merasa sebagai negaranya (*The people feel the same as the state*),
4. Rakyat patuh pada kepada keputusan pemerintahnya (*The people consent to the decisions of their governors*),
5. Pemerintah adalah wakil yang melaksanakan intruksi dari para pemilihnya (*The governors are agent or delegates who carry out the instruction received from their electors*).
6. Rakyat yang menentukan membuat keputusan-keputusan politik yang relevan (*The people there, in some significant way, in the making of relevant political*),
7. Pemerintah adalah contoh wakil dari rakyat (*The governors are a representative sample of the governed*).

---

<sup>3</sup> Sartono dalam Syarif Karim, "Fenomena Perwakilan Politik Di Indonesia, Minggu 31 Oktober 2010, diunduh tanggal 20 April 2012, jam 10.00

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perwakilan politik dapat didefinisikan sebagai pelimpahan sementara atas kewenangan politik warga negara kepada (sekelompok) orang yang mereka pilih secara bebas, untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan rakyat yang secara jelas dirumuskan. Sedangkan varian perwakilan menurut Hoogerwerf dalam sudut pandang hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili dapat digolongkan kedalam lima tipe:<sup>4</sup>

a. Tipe Utusan

Yakni wakil yang bertindak sesuai dengan perintah dari pihak yang diwakilinya.

b. Tipe Wakil.

Yakni wakil memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili, dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. Dengan demikian keberadaan wakil tidak tergantung pihak yang diwakilinya.

c. Tipe Politik.

Yakni kombinasi antara tipe utusan dan tipe wali. Tergantung pada situasi, wakil kadang harus berperan sebagai wali, kadang sebagai utusan.

d. Tipe Kesatuan.

---

<sup>4</sup>Hoogerwerf dalam Syarif Karim, "Fenomena Perwakilan Politik Di Indonesia, Minggu 31 Oktober 2010, diunduh tanggal 20 April 2012, jam 10.00

Yakni seluruh anggota lembaga perwakilan dipandang sebagai wakil dari seluruh rakyat, tanpa membedakan asal partai politik yang mempromosikan mereka.

e. Tipe penggolongan.

Yakni anggota lembaga perwakilan dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial, dan politik tertentu.

Dari klasifikasi Hoogerwerf ini tampak bahwa para wakil Indonesia berada pada situasi dilematis. Di satu sisi, mereka dapat dimasukkan sebagai tipe kesatuan. Di lembaga perwakilan, para wakil rakyat harus lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat, tanpa memandang pengelompokan politik yang ada. Pada sisi yang lain, ada ikatan yang sangat erat antara para wakil rakyat dengan organisasi politiknya, bahkan dengan kelompok teritorialnya atau daerahnya.

Wakil yang “benar” dalam sudut pandang cita-cita demokrasi adalah wakil tipe kesatuan (integrated). Alasan yang bisa dikemukakan adalah bahwa mandat representatif dimiliki oleh tipe kesatuan seperti dikemukakan oleh Hoogerwerf. Partai politik dalam hal ini hanyalah alat atau “kendaraan” yang digunakan oleh orang untuk menjadi wakil rakyat. Lembaga Perwakilan (DPR) merupakan arena dimana dia berbuat atas nama dan kepentingan rakyat yang diwakili. Bahkan pada saat dia beraktivitas sebagai wakilnya rakyat, tidak relevan bila dikaitkan dengan alat atau “kendaraan” yang digunakannya selama ini.

Selanjutnya, ada dua teori klasik yang sangat dikenal dalam politik tentang hakikat hubungan antara wakil (legislator) dengan terwakil (rakyat) yakni :

1. Teori Mandat (*Functional Representation*).

Menurut Teori Mandat ini yang pertama kali diperkenalkan oleh J.J. Rousseau, bahwa wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Maka seharusnya wakil selalu memberikan pandangan bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, pandangan wakil secara pribadi tidak diperkenankan dan dipergunakan dalam kualifikasinya sebagai wakil bagi terwakil. Bila terjadi perbedaan pandangan, sikap dan tindakan antara wakil dengan pihak yang diwakili dapat berakibat turunnya reputasi wakil. Teori ini dianggap lebih menguntungkan karena wakil dapat dikontrol secara setiap saat.

2. Teori Kebebasan (*Political Representation*).

Pendapat ini dikembangkan oleh Abbe Sieyes di Perancis, serta Block Stone di Inggris. Menurut teori ini, wakil dapat bertindak bebas tanpa tergantung instruksi yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Wakil merupakan orang yang terpercaya, terpilih, serta memiliki kesadaran akan hukum dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Oleh sebab itu mereka dapat melakukan tindakan apa pun atas nama mereka. Dalam hal ini terwakil telah memberikan kepercayaan kepada wakilnya. Karena itu pertimbangan wakil secara pribadi yang memperhatikan keseluruhan

aspek yang terikat kepada masalah yang dihadapi amat menentukan keputusan dan sikap wakil.

Uraian penjelasan tentang lembaga dan beberapa sistem perwakilan serta peran politik yang melekat pada lembaga perwakilan rakyat mestinya menjadi dasar pertimbangan rakyat dalam menentukan aktor/elit yang manakah yang sepatutnya akan dipilih untuk dipercaya mewakilinya karena yang bersangkutan memiliki kemampuan sebagai wakil rakyat.

### **1.6.3 Elektabilitas Pemilu Legislatif DPD**

Kemajuan dalam penerapan sistem parlemen yang dimiliki oleh sebuah negara dapat dijadikan sebagai rujukan atas upaya memperbaiki suatu sistem parlemen pada suatu negara tertentu. Sistem parlemen Amerika Serikat merupakan salah satu sistem parlemen yang telah lama berkembang dengan baik. Nampaknya Indonesia hendak meniru, walau tidak sepenuhnya, sistem parlemen bikameral AS untuk memperbaiki kondisi parlemen Indonesia yang tidak merepresentasikan pada kepentingan rakyat pada Era Orde Baru. Parlemen Amerika Serikat yang terdiri atas Badan Perwakilan (*House of Representative*) dan Senat dicoba untuk diadopsi.

Sistem parlemen di Indonesia terdiri atas dua kamar, yaitu DPR sebagai *political representative* dan DPD sebagai *regional representative*. Perbedaan yang lain dari unsur perwakilan tersebut adalah terletak pada kewenangan, dimana menurut UUD 1945 amandemen, jika DPR memiliki kewenangan hingga pada level memutuskan dan menetapkan, maka DPD hanya terbatas pada bidang urusan

yang telah ditentukan dengan kewenangan hanya pada level-level tindakan yang hanya dapat mengajukan dan ikut membahas RUU serta memberi pertimbangan dan dapat melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, tidak mudah bagi anggota DPD untuk duduk di lembaga parlemen dengan betul-betul dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai *regional representative* (wakil dari rakyat dan wilayah atau daerah pemilihannya).

Terlepas dari kesulitan-kesulitan akibat jeratan hukum tersebut, rakyat diberi kekuasaan, kesempatan dan harapan untuk memilih wakil-wakilnya. Paling tidak ada dua hal penting yang harus dipenuhi oleh seorang calon kandidat DPD, yaitu tersedianya aspek kapabilitas (*capability*) dan aspek aseptabilitas (*acceptability*). Terkait dengan konteks kapabilitas ini tentu berada dalam ruang lingkup yang luas meliputi berbagai banyak kemampuan khususnya yang berhubungan dengan kemampuan kepemimpinan, kemampuan intelektual dan sebagainya. Untuk mendapatkan kandidat yang memiliki kapabilitas yang dinilai baik dan layak untuk diterima sebagai kandidat, maka mestinya akan dilihat pada *track record*, baik secara kualitas maupun kuantitas, atas ide, inovasi dan keterlibatan kandidat dalam berbagai kegiatan atau berbagai penyelesaian permasalahan yang ada di daerah pemilihannya.

Sedangkan aspek aseptabilitas berkaitan dengan pertanyaan mengenai siapakah yang pantas menjadi aktor yang dipandang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan daerah pemilihannya. Aseptabilitas politik oleh masyarakat banyak paling mudah dapat dilihat dari *degree of electability* yang dimiliki kandidat dalam Pemilu Legislatif DPD. Jadi kemenangan seseorang

kandidat akan ditempuh melalui dua tahap, yaitu tahap pertama adalah lolos seleksi administrasi dan tahap kedua adalah lolos seleksi dari rakyat yang ditentukan dengan mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam pemungutan suara yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Salah satu syarat untuk menang dalam pemilu adalah lolos dari seleksi rakyat dalam pemilu, yaitu berhasil mengantongi suara terbanyak. Namun perkembangan demokrasi modern saat ini mampu menyuguhkan adanya cara atau strategi pengelolaan perilaku pemilih, yaitu dengan lahirnya banyak cara atau strategi yang dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku pemilih. Sejak dilaksanakannya pemilihan elite pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif, secara langsung oleh rakyat di tingkat nasional dan lokal pada tahun 2004, terjadi fenomena yang menarik dengan banyak bermunculannya lembaga survei (sekaligus produk perhitungan cepat-*Quick Count*) yang menfokuskan diri pada survei di bidang politik, diantaranya adalah Lingkaran Survei Indonesia, Barometer Indonesia, Lembaga Survei Indonesia. Kehadiran lembaga survei adalah keharusan bagi negara demokrasi. Studi tentang pendapat umum di Amerika Serikat telah mengalami perkembangan pesat sejak 1950-an, terutama untuk mengetahui sikap dan preferensi politik masyarakat umum. Lembaga-lembaga survei semacam ini yang sangat terkenal di AS, diantaranya adalah Gallup Poll, Harris Poll, Roper, Crosley Poll, Pew Research dan Rasmussen.

Lembaga-lembaga survei ini aktif melakukan penelitian, diantaranya untuk (Adlin, S., Sos., M.Si, Survey Politik dan Keputusan Maju Dalam Pilkada, Riau ResearchCentre, 2009, <http://riauresearchcentre.blogspot.com>):

1. memetakan potensi terpilihnya kandidat;
2. mendapatkan data-data tingkat keterpilihan kandidat;
3. mendapatkan keunggulan dan kekurangan kandidat, serta
4. mengetahui dan menganalisis isu-isu yang disukai pemilih

Dari penelitian ini akan dihasilkan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan tidak hanya dari seorang kandidat saja tetapi juga penguasaan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki lawan politiknya. Sebab, sebagaimana dikatakan Shun Tze (dalam Adlin, S., Sos., M.Si) bahwa sudah dapat dipastikan bahwa kita akan dapat memenangkan pertempuran, apabila kita telah mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita sendiri maupun penantangannya.

Dengan dikenalnya kekuatan dan kelemahan tersebut maka akan dapat disusun peluang-peluang dan diketahui ancaman-ancaman dalam kemenangannya. Dari sini akan tersusun strategi memaksimalkan kekuatan dan menutupi kelemahan kandidat, serta dapat membuat strategi yang dapat menurunkan popularitas pesaingnya dimata pemilih, sehingga terjadi perubahan dukungan, yaitu pemilih tidak lagi tertarik untuk memilih pesaingnya tetapi berubah memberikan suara pada dirinya. Akhirnya dengan analisa SWOT terhadap temuan-temuan yang dihasilkan lembaga survei dapat dijadikan bahan dalam menyusun strategi dan taktik yang efektif dalam kemenangan seorang kandidat,

termasuk bagaimana strategi dalam mengalihkan atau merubah dukungan pemilih agar berpaling dari calonnya dan memindahkan suaranya pada seorang kandidat.

Pentingnya peran lembaga survei untuk merumuskan peta kandidat dan blok kekuatan dalam pemenangan pemilu, maka banyak dari para kandidat yang menggunakan jasa penelitian yang bergerak di bidang politik ini. Walaupun diperlukan sikap hati-hati dan ketepatan dalam memilih lembaga survei yang obyektif dan independen. Karena dilakukannya pemilu langsung dibarengi pula oleh menjamurnya lembaga-lembaga survei yang bermain/merekayasa data demi meraup kepentingannya, sehingga hasilnya akan menyesatkan.

Terkait dengan terjadinya perubahan dukungan pemilih, menurut Riswanda Himawan (Suara Merdeka, 20 April 2004) menyebutkan adanya 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu::

1. *Civic disengagement*

yaitu Sikap masyarakat yang mampu mengambil jarak dengan proses politik yang berlangsung sehingga hal tersebut memungkinkan mereka berpikir dan bertindak (lebih) rasional. Melweit mengatakan bahwa dalam hal ini, pertimbangan *cost & benefit* menjadi landasan bagi pemilih. Dengan demikian maka program dan visi-misi kandidat menjadi perhatian yang utama.

2. *Swinging voters*

yaitu, lunturnya afiliasi politik pemilih terhadap partai pilihannya sebagai akibat ketidakmampuan partai memenuhi harapan atau janji kepada konstituennya.

3. *Split voting*

yaitu, berhubungan dengan konsistensi atau inkonsistensi sikap pemilih dalam menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada.

Masih terkait dengan perilaku pemilih, August Campbel (dalam Adlin, S., Sos., M.Si) mengatakan bahwa identifikasi fanatisme terhadap partai merupakan temuan penting dalam pemilu, namun identifikasi kepartaian bukanlah faktor tunggal dari faktor lain yang berperan utama dalam memahami perilaku pemilih, karena faktor pemahaman terhadap isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, citra dan poster kandidat serta situasi sosial yang sedang berjalan juga akan berpengaruh pada pemenangan kandidat. Demikian juga yang disampaikan Hugh A. Bone & Austin Ranney (dalam Adlin, S., Sos., M.Si), yaitu bahwa “bukan hanya identifikasi kepartaian tetapi juga orientasi terhadap isu dan orientasi terhadap calon merupakan determinan yang paling penting terhadap perilaku pemilih”. Hal ini dapat diukur melalui figur dan popularitas yang dimiliki seorang kandidat.

Dalam pemilu karena yang dipilih adalah orang, maka faktor figur akan dijadikan salah satu faktor penentu kemenangan seorang kandidat. Sedangkan menurut survey yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia di provinsi, kabupaten dan kota diseluruh Indonesia, dihasilkan bahwa popularitas kandidat merupakan faktor determinan kemenangan kandidat dalam pemilu. (Muhammad Qodari: “Siap-siap Gubernur Jakarta 2007”,<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=142564> )

Selanjutnya masih menurut Muhammad Qodari, dikatakan bahwa popularitas seorang kandidat itu dapat diketahui melalui survei. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukurnya, yaitu:

*Pertama*, indikator tingkat pengenalan. Dengan indikator tingkat pengenalan akan dilihat seberapa banyak kandidat dikenal oleh masyarakatnya. Upaya-upaya pengenalan seorang kandidat pada masyarakatnya seringkali dilakukan dengan sosialisasi diri, program dan visi-misi kandidat melalui pemasangan baliho, spanduk, kunjungan/pertemuan langsung dengan warga, diskusi, debat publik, pemasangan iklan, baik melalui media cetak maupun elektronik dll. Pengenalan kandidat ini oleh masyarakat merupakan syarat fundamental dalam pemilu.

Namun demikian seringkali terjadi seorang kandidat merasa telah dikenal oleh masyarakat namun kalah dalam pemilu. Hal ini terjadi disebabkan kesalahan cara ukur dan indikator pengukuran yang salah, yaitu:

1. sebagai pejabat publik “*taken for granted*”

perasaan ini muncul biasanya dari kandidat yang berasal dari unsur pejabat publik (seperti kepala dinas, kepala biro, dll termasuk calon *incumbent*). Dia merasa bahwa karena memegang jabatan publik, sudah barang tentu masyarakat mengenalnya.

2. bisikan yang tidak akurat karena faktor subyektivitas dan atau kepentingan pembisik.

3. perilaku “*over-generalization*”

yaitu perilaku yang terjadi pada kandidat ini dapat digambarkan seperti seorang bupati yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau seorang kepala desa yang mencalonkan diri sebagai bupati. Pengenalan dirinya oleh masyarakat diwilayah kerjanya digeneralisir sebagai pengenalan dirinya oleh masyarakat hingga luar wilayah kerjanya.

*Kedua*, indikator tingkat kesukaan. Dengan indikator ini akan dicoba dilihat tentang seberapa jauh seorang kandidat disukai oleh masyarakatnya. Kandidat tidak cukup hanya dikenal. Banyak kandidat yang dikenal, tetapi kurang atau tidak disukai publik. Idealnya adalah kandidat yang sangat dikenal dan disukai publik dan yang tidak ideal adalah, kandidat yang tidak dikenal publik, dan diantara mereka yang kenal ia tidak disukai. Indikator ini sulit diukur dengan dugaan-dugaan yang tidak berbasis survei.

*Ketiga*, indikator tingkat dukungan. Melalui indikator ini akan dicari seberapa banyak seorang kandidat dipilih. Alasan yang diberikan dalam memberikan dukungan umumnya adalah :

1. alasan sosiologis atau primordial (kesamaan daerah asal, agama, suku)
2. alasan personaliti yang menarik, yaitu:
  - a. penampilan fisik yang menarik
  - b. sifat-sifat yang dimiliki, seperti pintar, jujur, tegas, berwibawa dan perhatian.
3. dinilai mampu menyelesaikan masalah-masalah daerah (ekonomi, hukum, politik, keamanan dll)

Tiap daerah mempunyai karakteristik pemilih yang unik. Karenanya, proporsi alasan memilih masyarakat bervariasi antar daerah. Namun demikian berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), kompetensi calon merupakan faktor yang nyaris selalu paling besar dari alasan lainnya, walaupun secara ideal adalah bahwa kandidat yang bisa menggabungkan yang terbaik dari 3 indikator, yaitu kandidat yang putra daerah, memiliki kepribadian yang menarik dan yang dianggap kompeten.

Dari data LSI juga disebutkan bahwa prosentase rata-rata kemenangan *incumbent* vs penantang adalah 60%. Faktor *incumbent* memang diuntungkan. *Incumbent* dinilai mempunyai kelebihan dalam hal pemahaman terhadap daerahnya, sehingga penyusunan program dan visi-misi tentunya akan lebih fokus. Namun demikian kemenangan ini tentu juga sangat tergantung pada tingkat kepuasan publik terhadap kinerja *incumbent* dan tergantung pula pada tingkat popularitas calon penantang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilu sebenarnya adalah kompetisi *track record* kandidat yang dapat dijelaskan melalui:

1. konten isu dan program yang dijabarkan
2. *campaign*, dan
3. faktor dari kandidat itu sendiri

Dalam rangka untuk memenangkan kompetisi itu, keberadaan tim sukses seorang kandidat tentu juga akan sangat berpengaruh, karena tim sukses berperan sebagai perantara yang menghubungkan calon dengan massa rakyat, yang akan bertindak sebagai salah satu agen yang mensosialisaikan kandidat berikut dengan program, visi dan misinya, yang akan menyebar memburu dan menangkap hati rakyat.

Pemilu adalah tentang sebuah komoditas musiman, yang ramai sesaat setelah itu lenyap. Hubungan keterikatan antara pedagang (kandidat) dengan pembeli komoditas (pemilih) begitu longgar hanya dalam konteks saling membutuhkan secara momental, setelah kegiatan tukar menukar komoditas dengan uang maka urusan dan hubungan juga selesai. Oleh karena sifatnya yang momental maka perlu disusun suatu strategi pemasaran yang tepat. Bagaimana membuat apa yang ditawarkan itu memikat hati rakyat. Dan bagaimana cara, taktik dan strategi yang digunakan sehingga apa yang ditawarkan itu memikat hati rakyat. Dalam bidang politik, kegiatan ini kemudian dikenal dengan istilah *political marketing strategy*.

Sebagaimana basic teori marketing maka strategi pemasaran politik juga dipengaruhi oleh faktor 4 P yang penting yaitu:

1. *Product*, adalah menyangkut tentang bagaimana kualitas kandidat yang diusung.
2. *Price*, adalah menyangkut kapasitas yang ditawarkan oleh kandidat berkaitan dengan daya kesesuaian dengan indikator-indikator internal yang dimiliki oleh masyarakat pemilih. Artinya seberapa tinggi sebenarnya gengsi politik kandidat dalam perspektif pemilih menjadi konsen utama dalam pertimbangan-pertimbangan politik para masyarakat pemilih.
3. *Place*, adalah menyangkut konteks pertanyaan atau konsen: dalam konteklokasional seperti apakah seorang kandidat bisa ditawarkan, bisa “dijual” kepada masyarakat pemilih.
4. *Performance*, adalah menyangkut pada kinerja, prestasi apa yang dimiliki oleh seorang kandidat sehingga seseorang bisa diyakinkan untuk memilih kandidat tersebut.

Tentu saja strategi pemasaran politik tersebut diatas bisa meleset atau ada faktor lain yang determinan dalam kemenangan seorang kandidat dalam pemilu, misalnya pemberian uang yang dipergunakan untuk menarik suara rakyat. Hal ini dimungkinkan terjadi karena sebagaimana teori *public choice* menempatkan faktor *self interest* dan *materialism* menjadi faktor yang paling menentukan dalam perilaku politik. Jika ini terjadi maka perilaku pemilih dapat berlaku sangat transaksional dalam pemilu.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diketahui terdapatnya banyak faktor yang menentukan elektabilitas kandidat dalam pemilu legislatif DPD. Apalagi fakta menunjukkan bahwa suara rakyat sulit untuk ditebak dan dipegang, rakyat sebagai pemilih dapat mengalihkan dukungan. Dilain pihak sesungguhnya para kandidat ini melakukan sesuatu atau strategi dan taktik politik yang tidak berbeda jauh dalam proses kompetisi pemilihan umum legislatif DPD., yaitu kesamaan dari kegiatan sosialisasi/pengenalan diri, program serta visi-misi kandidat melalui pemasangan baliho, debat publik, menggunakan sarana media komunikasi, intensitas pertemuan dengan rakyat ditingkatkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, pembentukan tim sukses, melakukan kampanye hingga pemberian uang (*money politics*). Namun selalu saja faktor-faktor yang menentukan dan determinan mempengaruhi kemenangan seorang kandidat pada setiap daerah akan bersifat unik. Salah satu contoh keunikan itu adalah pemilu Kota Semarang pada tahun 2010, yang menghasilkan terjadinya anomali politik, yaitu terpilihnya kandidat sebagai Walikota Semarang pilihan rakyat (Drs. Soemarmo) adalah karena pemilikan *performance* yang dinilai baik oleh pemilihnya (Fitriyah dan Hermeni, 2010). Tentu ini juga disebabkan karena setiap daerah membutuhkan karakteristik elite wakil daerah yang unik pula sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang ada di daerah dan masyarakatnya.

## 1.7 DEFINISI KONSEPTUAL

Dari variabel-variabel penelitian diturunkan konsep-konsep pokok dengan definisi konseptualnya sebagai berikut:

1. Pemilu Legislatif DPD adalah suatu kegiatan pemilihan anggota DPD di masing-masing daerah pemilihan (*regional representative*) yang dilakukan dengan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat.
2. Kandidat anggota DPD adalah seseorang yang mencalonkan diri sebagai kandidat anggota DPD yang akan dipilih oleh rakyat untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan umum untuk menentukan anggota DPD.
3. DPD adalah suatu badan perwakilan rakyat dari unsur perwakilan wilayah, region atau daerah yang berbentuk atau tingkat propinsi.
4. Faktor-faktor yang menentukan kemenangan kandidat dalam pemilu adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau berpengaruh terhadap dipilihnya seorang kandidat sehingga kandidat tersebut memenangkan suara dalam Pemilu Legislatif DPD.
5. Strategi Pemenangan Pemilu Legislatif DPD adalah strategi yang dibangun untuk memenangkan kandidat anggota DPD.
6. Keterpilihan seorang kandidat calon anggota DPD melalui Pemilu Legislatif DPD

## **1.8 METODE PENELITIAN**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksploratif, artinya suatu penelitian yang bermaksud untuk menemukan fenomena kecenderungan-kecenderungan baru tentang sesuatu hal. Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk menemukan kecenderungan mengenai elektabilitas Denty Eka Widi Pratiwi sebagai calon anggota DPD terpilih yang mampu meraup perolehan suara tertinggi, dengan tanpa kepemilikan massa sebagaimana dimiliki oleh 3 kandidat pemenang Pemilu Legislatif DPD lainnya.

### **1.8.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemilih Pemilu Legislatif DPD 2014 untuk Propinsi Jawa Tengah, dengan 20 informan dari beberapa unsur yaitu pemilih yang memberikan dukungan dan suara ke Denty, Tim Pemenangan dan birokrat yang terkait dengan DPD di Propinsi Jawa Tengah.

### **1.8.3 Sumber Data**

Data dalam penelitian ini bersumber dari data-data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan terpilih dan dokumen-dokumen yang tersedia yang terkait dengan penelitian ini.

#### **1.8.4 Teknik Koleksi Data**

Teknik yang digunakan sebagai upaya pengumpulan data penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka

Pengumpulan data dari berbagai dokumen tertulis yang terkait dengan penelitian, yaitu laporan, buku-buku, makalah-makalah, tulisan-tulisan serta dokumen lain yang terkait.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh data primer guna melengkapi data primer dari angket. Wawancara dilakukan menggunakan panduan berupa tema-tema pokok, tetapi peneliti mengembangkan lebih jauh sesuai kondisi dalam mencari informasi yang diperlukan.

#### **1.8.5 Analisis dan Interpretasi Data**

Data yang didapatkan dilapangan akan diolah dan diklasifikasikan sesuai dengan derajat kepentingannya, kemudian terhadap hasil pengolahan dan klasifikasi data tersebut akan dilakukan analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap baik data informasi maupun uraian tertulis maupun verbal kemudian dikaitkan dengan data informasi serta uraian tertulis dan verbal lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga

memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada dan sebaliknya.

#### **1.8.6 Kualitas Penelitian**

Pemilu Legislatif DPD 2014 Propinsi Jawa Tengah memiliki daya tarik sendiri, karena terdapatnya perolehan jumlah suara yang sangat fantastis besarnya yang dicapai oleh seorang kandidat yang tidak memiliki basis massa sebagaimana 3 (tiga) kandidat pemenang lainnya. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, dan belum ada yang melakukan penelitian. Dengan demikian maka penelitian ini akan memberikan kualitas penelitian yang menggambarkan temuan fenomena yang baru dan memberikan solusi permasalahan yang ditemukan.

#### **1.8.7 Kelemahan/Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya fokus dilakukan pada elektabilitas Denty Eka Widi Pratiwi dalam Pemilu Legislatif DPD 2014 untuk Propinsi Jawa Tengah. Dengan demikian maka penelitian ini akan ditemukan keterbatasan untuk dapat melakukan perbandingan dengan elektabilitas calon DPD lainnya yang mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif DPD 2014 untuk Propinsi Jawa Tengah.

## **Bab II**

### **Deskripsi Provinsi dan DPD RI Periode 2014 – 2019 Daerah Pemilihan Jawa Tengah**

#### **2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah**

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari pulau-pulau dengan ukuran besar dan kecil, sehingga oleh karenanya disebut sebagai negara kepulauan. Negara dengan jumlah penduduk 237.641.326 juta jiwa menjadi sebuah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia (setelah Amerika Serikat, Cina dan India). Dari jumlah penduduk Indonesia ini, sekitar 60% jiwa bertempat tinggal di Pulau Jawa dan dengan luas wilayah Pulau Jawa 129.284,48 Km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Jawa adalah 1.057 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dengan angka kepadatan penduduk di Jawa ini maka Jawa dikategorikan sebagai wilayah terpadat di dunia.<sup>1</sup> Adapun wilayah Pulau Jawa meliputi 6 provinsi, yaitu Provinsi DIY, Provinsi DKI, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Menggambarkan Provinsi Jawa Tengah, ada beberapa bidang atau aspek yang bisa menjelaskannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Posisi strategis dari aspek letak geografis<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [http://ppejawa.com/ekoregion/kultur-2/dan http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&id\\_subyek=12](http://ppejawa.com/ekoregion/kultur-2/dan http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=12), diolah

<sup>2</sup> [http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com\\_content&view=section&id=13&Itemid=28](http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=13&Itemid=28)

Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur. Sedangkan posisi letaknya berada di tengah-tengah pusat kegiatan ekonomi di Pulau Jawa, yaitu diantara atau diapit oleh dua Propinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Dapat pula dimaknakan bahwa posisi letaknya berada diantara pusat pengembangan kawasan barat, seperti Jakarta-Bogor-Tangerang serta Bekasi dan kawasan timur, yang meliputi Gresik – Bangkalan – Mojokerta – Surabaya – Sidoardjo - Lamongan (Gerbang-kertasusila). Posisi ini cukup strategis dan tentu akan sangat menguntungkan, terlebih dengan didukung adanya pembangunan jalan tol di Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar), mengingat Jawa Tengah sebagai jalur utama transportasi yang padat dan sibuk, sebagai jalur penghubung antar pusat-pusat pertumbuhan dan sebagai jalur distribusi barang dan jasa yang strategis di Pulau Jawa.

. Ditambah lagi dengan adanya jalur pelayaran baik nasional maupun internasional di pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Semua itu memungkinkan Jawa Tengah memperluas jaringan pemasaran dan perdagangan antar kota, antar pulau hingga pada perdagangan internasional. Maknanya, Provinsi Jawa Tengah bernilai ekonomis. Posisi menguntungkan ini juga didukung oleh luas wilayah dan bentuk atau jenis tanahnya, yaitu luas Pulau Jawa adalah 1,70 % dari luas Indonesia, dan seluas sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa tersebut (3,25 juta hektar) merupakan luas Provinsi Jawa Tengah. Luas yang ada tersebut terdiri dari 30,80 % (1,00 juta hektar) lahan sawah dan 69,20% (2,25 juta hektar) berujud bukan lahan sawah. Kondisi sumber daya alam yang sebagian besar berujud

bukan lahan sawah, kondusif untuk tersedianya kawasan peruntukan Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Perkebunan, Pertanian (kering), Peternakan, Perikanan, Pertambangan, Industri, Pariwisata dan Perhotelan serta Permukiman.

Keragaman hayati yang didukung dengan potensi sumberdaya alam yang beragam, menjadikan wilayah Jawa Tengah cukup strategis sebagai wilayah penyangga kehidupan di Pulau Jawa. Dengan didominasi oleh potensi pertanian yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah, menjadikan Jawa Tengah memiliki kekuatan geostrategis sebagai basis utama politik pertanian nasional. Namun semua tergantung bagaimana dan kesungguhan dalam manajemen sumber daya yang dimilikinya, termasuk bagaimana DPD RI yang mengemban tugas dan kewajiban yang melekat dan terkait kepadanya, yaitu sebagai *representative regional*.

## **2. Provinsi dengan peringkat ke tiga dalam aspek besarnya jumlah penduduk**

Wilayah Indonesia terbagi menjadi 33 Provinsi, 403 Kabupaten dan 96 Kota, dengan luas dan sebaran penduduk yang tidak merata, melainkan menumpuk di Jawa, khususnya di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gambaran kondisi luas dan sebaran penduduk ini tersaji dalam Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1****Jumlah dan Sebaran Penduduk Indonesia<sup>3</sup>**

| <b>No.</b>        | <b>Provinsi</b>           | <b>Tahun 2010</b>  |
|-------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>1</b>          | <b>2</b>                  | <b>3</b>           |
| 1.                | Aceh                      | 4 494 410          |
| 2.                | Sumatera Utara            | 12 982 204         |
| 3.                | Sumatera Barat            | 4 846 909          |
| 4.                | Riau                      | 5 538 367          |
| 5.                | Jambi                     | 3 092 265          |
| 6.                | Sumatera Selatan          | 7 450 394          |
| 7.                | Bengkulu                  | 1 715 518          |
| 8.                | Lampung                   | 7 608 405          |
| 9.                | Kepulauan Bangka Belitung | 1 223 296          |
| 10.               | Kepulauan Riau            | 1 679 163          |
| 11.               | DKI Jakarta               | 9 607 787          |
| 12.               | Jawa Barat                | 43 053 732         |
| <b>13.</b>        | <b>Jawa Tengah</b>        | <b>32 382 657</b>  |
| 14.               | DI Yogyakarta             | 3 457 491          |
| 15.               | Jawa Timur                | 37 476 757         |
| 16.               | Banten                    | 10 632 166         |
| 17.               | Bali                      | 3 890 757          |
| 18.               | Nusa Tenggara Barat       | 4 500 212          |
| 19.               | Nusa Tenggara Timur       | 4 683 827          |
| 20.               | Kalimantan Barat          | 4 395 983          |
| 21.               | Kalimantan Tengah         | 2 212 089          |
| 22.               | Kalimantan Selatan        | 3 626 616          |
| 23.               | Kalimantan Timur          | 3 553 143          |
| 24.               | Sulawesi Utara            | 2 270 596          |
| 25.               | Sulawesi Tengah           | 2 635 009          |
| 26.               | Sulawesi Selatan          | 8 034 776          |
| 27.               | Sulawesi Tenggara         | 2 232 586          |
| 28.               | Gorontalo                 | 1 040 164          |
| 29.               | Sulawesi Barat            | 1 158 651          |
| 30.               | Maluku                    | 1 533 506          |
| 31.               | Maluku Utara              | 1 038 087          |
| 32.               | Papua Barat               | 760 422            |
| 33.               | Papua                     | 2 833 381          |
| <b>Indonesia:</b> |                           | <b>237 641 326</b> |

Pada Tabel di atas terbaca bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terpadat no 3 setelah Provinsi Jawa Barat dan

<sup>3</sup>[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&id\\_subyek=12](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=12)

Jawa Timur, yaitu pada tahun 2011 sebanyak 32.643.612 jiwa. Faktor jumlah penduduk yang besar tentu akan merepotkan bagi setiap daerah. Jawa Tengah masih menghadapi permasalahan dalam hal kependudukan, khususnya terkait pada sebaran penduduk yang tidak merata sehingga tercipta kesenjangan antar daerah, angka kemiskinan yang masih besar dan progres penurunannya masih cenderung lambat, serta pengangguran yang hingga saat ini juga masih perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah saat ini, terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor industri dan perdagangan. Namun demikian jika faktor besarnya jumlah penduduk ini dapat dilakukan pengelolaan yang baik dan tepat, maka akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal penting dan menentukan bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Walau ada permasalahan, namun pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, dan bahkan pada Tahun 2012 berada pada angka sebesar 73,36, dimana angka ini di atas rata-rata IPM Nasional sebesar 73,29 dan apabila dibandingkan dengan Provinsi se Jawa berada pada posisi ke-3 (tiga) di bawah Provinsi DKI dan DIY ( Badan Pusat Statistik, 2013). Kondisi ini dapat menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah.

Adapun luas, sebaran dan tingkat kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut tersaji dalam bentuk tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**  
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011<sup>4</sup>

| No. | Kabupaten/Kota    | Luas Daerah (Km <sup>2</sup> ) | Juml Penduduk     | Kepadatan Penduduk (Km <sup>2</sup> ) |
|-----|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1   | Kab. Cilacap      | 2.138,51                       | 1.651.940         | 772                                   |
| 2   | Kab. Banyumas     | 1.327,59                       | 1.570.598         | 1.183                                 |
| 3   | Kab. Purbalingga  | 777,65                         | 858.798           | 1.104                                 |
| 4   | Kab. Banjarnegara | 1.069,74                       | 875.214           | 818                                   |
| 5   | Kab. Kebumen      | 1.282,74                       | 1.162.294         | 906                                   |
| 6   | Kab. Purworejo    | 1.034,82                       | 696.141           | 673                                   |
| 7   | Kab. Wonosobo     | 984,68                         | 758.993           | 771                                   |
| 8   | Kab. Magelang     | 1.085,73                       | 1.194.353         | 1.100                                 |
| 9   | Kab. Boyolali     | 1.015,07                       | 936.822           | 923                                   |
| 10  | Kab. Klaten       | 655,56                         | 1.135.201         | 1.732                                 |
| 11  | Kab. Sukoharjo    | 466,6                          | 832.09            | 1.78                                  |
| 12  | Kab. Wonogiri     | 1.822,37                       | 929.870           | 510                                   |
| 13  | Kab. Karanganyar  | 772,20                         | 821.694           | 1.064                                 |
| 14  | Kab. Sragen       | 946,49                         | 861.939           | 911                                   |
| 15  | Kab. Grobogan     | 1.975,85                       | 1.316.693         | 666                                   |
| 16  | Kab. Blora        | 1.794,40                       | 833.786           | 465                                   |
| 17  | Kab. Rembang      | 1.014,10                       | 596.801           | 589                                   |
| 18  | Kab. Pati         | 1.491,20                       | 1.198.935         | 804                                   |
| 19  | Kab. Kudus        | 425,17                         | 788.264           | 1.854                                 |
| 20  | Kab. Jepara       | 1.004,16                       | 1.115.688         | 1.111                                 |
| 21  | Kab. Demak        | 897,43                         | 1.067.993         | 1.190                                 |
| 22  | Kab. Semarang     | 946,86                         | 944.877           | 998                                   |
| 23  | Kab. Temanggung   | 870,23                         | 715.907           | 823                                   |
| 24  | Kab. Kendal       | 1.002,27                       | 908.533           | 906                                   |
| 25  | Kab. Batang       | 788,95                         | 713.942           | 905                                   |
| 26  | Kab. Pekalongan   | 836,13                         | 845.471           | 1.011                                 |
| 27  | Kab. Pemalang     | 1.011,90                       | 1.264.535         | 1.250                                 |
| 28  | Kab. Tegal        | 879,7                          | 1.399.78          | 1.591                                 |
| 29  | Kab. Brebes       | 1.657,73                       | 1.742.528         | 1.051                                 |
| 30  | Kota Magelang     | 18,12                          | 118.606           | 6.546                                 |
| 31  | Kota Surakarta    | 44,03                          | 501.650           | 11.393                                |
| 32  | Kota Salatiga     | 52,96                          | 173.056           | 3.268                                 |
| 33  | Kota Semarang     | 373,67                         | 1.585.417         | 4.243                                 |
| 34  | Kota Pekalongan   | 44,96                          | 284.413           | 6.326                                 |
| 35  | Kota Tegal        | 34,49                          | 240.777           | 6.981                                 |
|     | <b>Jumlah:</b>    | <b>32.544,12</b>               | <b>32.643.612</b> | <b>1.003</b>                          |

Sumber: Provinsi Dalam Angka tahun 2012

<sup>4</sup> <http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203300JaTeng.pdf>

Pada tabel di atas terlihat bahwa secara administratif wilayah dan pemerintahan, Provinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota. 5 (lima) kabupaten/kota terbanyak penduduknya, secara berurutan dari yang paling banyak adalah: Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tegal. Adapun dalam hal kepadatan penduduk maka yang tertinggi secara berurutan adalah: Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Tentu hal ini bisa dimengerti karena status administrasinya sebagai wilayah Kotamadya.

Ketidakterataan sebaran penduduk ini, yang diikuti oleh kebijakan pembangunan wilayah yang tidak adil hingga pada wilayah dan masyarakat pinggiran, berakibat terciptanya kesenjangan wilayah di Jawa Tengah terkait dengan sebaran penduduk, sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, serta sarana sosial yang mendukung kehidupan masyarakat seperti sarana pendidikan dan kesehatan yang tidak terbagi secara proporsional.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dalam upaya untuk mendekatkan diri pemerintah pada masyarakat, sehingga upaya untuk mengetahui, memahami dan memenuhi kebutuhan rakyat akan dapat dilakukan. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka upaya-upaya tersebut diusahakan melalui tersedianya peluang untuk pemekaran daerah yaitu pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi, kota dan kabupaten dari induknya. DPD bertugas dalam urusan terkait pemekaran daerah. Dengan kata lain maka sebagai *representative regional*

maka DPD harus pandai mengerti, mengenali, memahami dan merealisasikan tugas dan tanggung jawabnya untuk ikut serta memperjuangkan terwujudnya pemerintahan daerah yang betul-betul dekat, paham dan mampu menyediakan dan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakatnya.

Peran DPD sebagai *representative regional* juga terkait dengan hubungan antara Pusat dengan daerah, yang mana dalam proses pembangunan di Jawa Tengah terdapat kendala besar, yaitu adanya disharmonis kebijakan pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di era otonomi daerah, masih terdapat kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinergis. Hal ini antara lain disebabkan belum adanya kewenangan penanganan untuk beberapa urusan pembangunan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. (<http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203300JaTeng.pdf>). Hendaknya DPD dapat berada di baris terdepan dalam mengatasi permasalahan ini.

### 3. Wisata dan Budaya

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa posisi letak wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diapit oleh 2 provinsi besar, didukung oleh kondisi wilayah yang sebagian besar berujud bukan lahan tanah dan jumlah penduduk yang melimpah, maka 3 kondisi ini akan menjadi faktor penting bagi usaha peningkatan kualitas kehidupan dari aspek atau sektor budaya dan wisata. Bahkan sektor budaya dan wisata merupakan sektor andalan bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan wisata

unggulannya diantaranya adalah Dieng, Borobudur, Solo, Sangiran, Nusakambangan, Karimunjawa, Tegal, Pekalongan, Rembang, dan Blora.

Berbagai obyek dan jenis wisata yang tersedia di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. Wisata Alam

Wisata alam diantara terdapat di :

- Tawangmangu di Sukoharjo,
- Baturaden di Banyumas
- Dieng di Wonosobo
- Kopeng di Salatiga
- Teluk Penyu di Cilacap,
- Pantai Kartini di Jepara,
- Pantai Widuri di Pemalang,
- Gua Petruk, Gua Jatijajar, sarang burung walet di Kebumen dan Nusa Kambangan
- Owabong atau Obyek wisata air Bojongsari, Desa Wisata Karangbanjar, Curug Silintang dan Silawang, Purbasari Pancuran Mas, Gua Lawa, Kelenteng Hok Tek Tjeng Sin, Kolam Pemandian Walik dan Wana Wisata Serang di Purbalingga

b. Wisata Budaya

Wisata budaya diantaranya adalah :

- Candi Borobudur (termasuk satu di antara 10 keajaiban dunia);
- Candi Prambanan,
- Candi Gedong Songo, dan
- Candi Sukuh.

c. Wisata Sejarah.

Wisata sejarah meliputi:

- Museum Sangiran di Surakarta,
- Museum Mangkunegaran di Surakarta,
- Keraton Surakarta,

---

<sup>5</sup><http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-jawa-tengah/pariwisata>

- Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak,
- Makam Sunan Muria,
- Masjid Demak peninggalan para Wali pada abad ke16 dan
- Museum Kartini,
- Museum Uang,
- Museum Wayang,
- Museum dan Perpustakaan Umum Daerah Poerbakawatja,
- Museum Reptil dan Serangga.
- Monumen Panglima Besar Jenderal Soedirman di Purbalingga

Dalam hal budaya, masyarakat Jawa Tengah dikenal sebagai masyarakat yang memiliki karakter masyarakat yang kuat dan berbudaya, mengedepankan tenggang rasa, *tepo saliro*, gotong royong, dan pekerja keras, serta tetap melestarikan kearifan lokal yang beragam warisan nenek moyang. Karakter masyarakat Jawa Tengah ini merupakan salah satu kekuatan atau modal dasar pada pembentukan masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya menuju pada cita-cita pembangunan Jawa Tengah yang berkepribadian dalam kebudayaan.

## **2.2 Gambaran Umum Anggota DPD RI Dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Periode 2014 – 2019**

Sebagaimana peraturan perundangan yang mengaturnya, yaitu UUD 1945 pada Bab VIIA Pasal 22 C (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dan (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maka melalui Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014, anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 4 orang dengan gambaran umum masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Akhmad Muqowam

Lahir di Salatiga, namun sejak tahun 1990 bertempat tinggal di Jakarta. Banyak organisasi yang diikuti dan digerakkan sejak 1983 saat dia berstatus sebagai mahasiswa hingga lulus dari Universitas Diponegoro. Organisasi yang digelutinya adalah merupakan organisasi-organisasi yang bersifat religius dan bernafaskan Islam, diantaranya seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang, PW GP Ansor Jateng, DPC PPP Jateng, PP GP Ansor Jakarta, dan DPP PPP Jakarta. Organisasi di luar nafas Islam yang diikutinya adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), baik saat masih di Semarang maupun di Jakarta.

Nampaknya, berangkat dari aktivitasnya di organisasi-organisasi yang digelutinya tersebut berpengaruh besar dan mampu mengantarkannya pada organisasi politik yang cukup besar, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga pada puncak karier politiknya sebagai anggota DPR-MPR RI dalam beberapa periode, yaitu sejak tahun 1997 hingga 2014 sebelum akhirnya mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPD melalui Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang lalu. Pengalaman kehidupan politiknya ini diharapkan akan dapat memberi kontribusi yang besar untuk mendapatkan kewenangan yang sama dengan DPR yang selama 2 periode ini diperjuangkan oleh DPD, sehingga tujuan untuk dapat mengangkat rakyat dan

daerah yang diwakilinya menuju pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan yang tepat dan baik dapat diwujudkan.

2. Dr. H. Bambang Sadono, SH., MH

Lahir di Blora Jawa Tengah. Karier politiknya hampir sama dengan Drs. H. Akhmad Muqowam, cukup cemerlang dan berasal dari partai politik. Muqowam dibesarkan PPP, sedangkan Bambang Sadono dari Partai Golkar, maka Bersama Muqowam menjadi anggota Parlemen sejak tahun 1997 hingga 2009. Meninggalkan Senayan bukan berarti tindakan menutup atau mengakhiri karier politiknya, sebab pada Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2009 - 2014, Bambang Sadono mencalonkan diri, terpilih dan menduduki kursi sebagai wakil ketua. Jenjang karier politiknya yang relatif cukup bagus tersebut, nampaknya disokong oleh kemampuan berorganisasi yang dimilikinya. Dari berbagai organisasi yang diikuti, pengaruh terbesar dalam kehidupan organisasinya rupanya berasal dari organisasi yang bergerak di bidang kewartawanan, hingga mengantarkan kedudukannya dari hanya sebagai wartawan biasa kemudian bisa pemimpin redaksi surat kabar harian yang cukup populer pada saat itu, yaitu Suara Karya. Karier kewartawanannya kemudian meningkat dengan disandangnya kedudukan sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Tengah dan kemudian meningkat menjadi Sekjen Pengurus Pusat PWI di Jakarta. Dalam kehidupan politiknya, Bambang Sadono berkiprah di partai politik bergambar pohon beringin, dan

dia memiliki kontribusi cukup besar hingga peran sebagai ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah yang pernah disandanginya.

Pada Pemilu Legislatif 2014, Bambang Sadono mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah. Kembalinya Bambang Sadono ke Senayan tentu membawa cita dan harapan yang besar, karena dengan pengalaman politiknya di lembaga legislatif, baik di Pusat maupun di Daerah, pengalaman dalam menghadapi, melobi dan memberikan perlawanan terhadap lawan-lawan politiknya, kepentingan-kepentingan rakyat dan daerah yang diwakilinya akan dapat dipenuhi secara lebih baik.

3. Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, SE., MH

Denty adalah satu dari 2 orang anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah yang merupakan *incumbent*. Lahir dan bertempat tinggal di Temanggung. Memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masyarakat di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung karena terkait dengan statusnya sebagai isteri pejabat teras di tingkat pemerintahan kecamatan. Sebagai isteri, dia memiliki peran dan tugas mendampingi suami dalam memimpin wilayahnya, diantaranya dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Candiroto, Kecamatan Jumo, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kledung dan Kecamatan Kandangan. Keberadaannya yang dekat dengan masyarakat ini diperkuat dengan kiprahnya di Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Temanggung dan Kepala Daerah

Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2008 yang karena tugas dan kewajibannya menyebabkan kontak dengan masyarakat dalam rangka pengawasan pemilu.

Namun faktor memiliki kedekatan dengan masyarakat saja tidak cukup untuk dapat menjalankan tugas, fungsi dan peran sebagai senator dari unsur *representative regional* pada lembaga parlemen. Dibutuhkan kemampuan lebih, baik secara fisik, edukatif, kreativitas, kemauan, sensitivitas, responsibilitas, kepedulian dan unsur-unsur lain yang akan mendorong kemajuan program pembangunan masyarakat dan wilayahnya sehingga peningkatan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat yang diwakilinya dapat terpenuhi. Nampaknya tuntutan ini tidak cukup mudah untuk dijalani, karena kapasitas dan pengalamannya yang terbatas dan terlebih Denty tidak memiliki *background* politik, sehingga akan mengalami kerepotan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerahnya saat berhadapan dengan anggota DPD lain, dan bahkan para anggota DPR, yang berangkat atau memiliki *political background*. Kondisi ini terbukti bahwa kedudukannya sebagai wakil rakyat belum nampak dan terasakan hasilnya dalam ikut mengatasi permasalahan-permasalahan daerah. Contoh kasus yang besar adalah bagaimana DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah menyikapi wacana tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap, pembentukan provinsi baru dari eks Karisidenan Banyumas dan eks Karisidenan Surakarta. Stigma miring ini bisa juga disebabkan karena belum atau kurangnya sosialisasi terhadap sepak terjang, kiprah dan kinerja para anggota DPD. Mestinya untuk menghadapi adanya *stereotype* terhadap DPD ini, ada

tindakan pro aktif untuk memberikan respon atas anggapan atau penilaian masyarakat tersebut, karena sebagai wakil dari rakyat dan daerah, harus memberikan pertanggung jawaban, walau itu hanya sekedar memberikan informasi terhadap masyarakat akan kerja dan kinerjanya selama ini. Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, maka media massa, baik berupa televisi, surat kabar maupun internet, face book, twitter dan lain sebagainya dapat digunakan untuk kepentingan tersebut. Dengan demikian maka masyarakat akan mengetahui sepak terjang DPD dalam memperjuangkan kepentingannya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan pada pemilu DPD selanjutnya. Sayangnya, metode ini tidak *familier* digunakan oleh para senator tersebut. Sebaliknya, jika kemudian anggota DPD tidak mau belajar dan memiliki konsep *mengalir saja bagaikan air mengalir*, maka sangat disayangkan. Kondisi ini diperparah dengan perilaku pemilih kita yang tidak memahami arti pentingnya peran dan tugas DPD sebagai *representative regional* yang akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah di Pusat. Masyarakat memberikan suaranya tanpa pertimbangan layak tidaknya, mampu tidaknya seseorang menjadi wakil rakyat di parlemen. Faktor inilah yang sering dipertanyakan berbagai pihak dan bahkan yang menjadi salah satu alasan DPR untuk bertahan tidak mau berbagi atau memberikan kewenangan yang sama antara DPR dengan DPD walau parlemen kita menerapkan *bicameral system*. Dengan kata lain, bagi anggota DPD yang telah terpilih melalui pemilihan umum, hendaknya tidak cukup untuk berbangga diri merasa menjadi “pilihan rakyat”, mengingat

kualitas perilaku pemilih kita yang rendah. Sebaliknya para senator tersebut harus introspeksi diri: benarkah saya menjadi pilihan rakyat (yang sesungguhnya), pantas dan mampukah saya menjadi wakil rakyat/daerah, apa yang akan bisa dan sudah saya lakukan untuk rakyat/daerah?

4. Dr. H. Sulistiyo, M. Pd.

Memiliki kesamaan dengan Denty sebagai anggota DPD *incumbent*. Perbedaannya adalah Sulistiyo memiliki massa yang cukup besar dan permanen, karena kiprahnya di organisasi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi yang digelutinya ini adalah sesuai dengan profesinya sebagai pendidik (guru/dosen). Kiprahnya di organisasi ini hingga menduduki jabatan sebagai Sekretaris Umum Pengurus PGRI Jawa Tengah dari tahun 1999 hingga 2009 dan menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Periode 2008 – 2013. Selain PGRI, Sulistiyo juga masuk dalam organisasi kepemudaan dan pernah menjabat sebagai wakil sekretaris DPD KNPI (1996 – 1999). Organisasi yang lainnya, adalah sebuah organisasi yang terkait dengan serikat pekerja Indonesia. Berbagai organisasi yang diikuti dengan jabatan yang disandang, dalam skop lokal maupun nasional, menyebabkan dirinya bisa dikenal oleh masyarakat, khususnya keluarga guru. Dengan demikian maka dapat dimaknai bahwa keterpilihannya dalam Pemilu DPD, dukungan suara dari PGRI bagi Sulistiyo, yang lahir di Banjarnegara ini, tentu tidak diragukan lagi kontribusinya. Namun demikian, bentuk konsekuensi dari kepercayaan dan terpilihnya Sulistiyo sebagai anggota DPD

RI dari daerah pilihan Provinsi Jawa Tengah dalam dua periode ini, bersama Denty, menjadi tantangan bagi keduanya. Mereka harus lebih bisa menunjukkan dan menghasilkan program-program bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang berkualitas yang dibutuhkan rakyat dan daerahnya. Terlebih 2 (dua) orang rekan anggota DPD terpilih dalam Pemilu Legislatif adalah orang-orang yang memiliki *political background* dan pengalaman di Parlemen. Demikian pula sebaliknya, sebagai *incumbent* anggota DPD, maka Sulistiyo dan Denty dapat *share* pengalaman kepada Bambang Sadono dan Muqowam, sehingga 4 (empat) orang anggota DPD ini bisa menjalin sinergitas yang baik demi rakyat dan daerah pemilihannya.

### **3.3 Gambaran Dukungan Suara Untuk Anggota DPD RI Dari Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Periode 2014 – 2019**

Dalam pesta demokrasi yang terselenggara 9 April 2014 dengan agenda untuk pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan presiden, untuk daerah pemilihan Jawa Tengah, Denty berhasil meraup angka tertinggi, yaitu 1.900.767, jauh dari perolehan suara dari 3 pemenang lainnya. Sedangkan jika dilihat dari hitungan kepemilikan massa dari 3 kandidat yang lain, yaitu Sulistiyo, Bambang Sadono dan Muqowam, perolehan suara Denty menjadi sangat unik dan fantastis, terlebih pemenangan perolehan suara yang didapatkannya hampir merata di beberapa wilayah, diluar Kabupaten Temanggung yang dianggap Denty memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat yang pernah dikelolanya sebagai isteri Camat.

Makna yang dapat ditarik dari gambaran tersebut di atas adalah bahwa Denty mendapat kepercayaan dan penilaian lebih dibandingkan dengan ketiga rekannya untuk menjadi orang yang akan bisa dan mampu untuk memperjuangkan rakyat dan daerah pilihannya menuju pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik yang lebih baik. Namun bisa juga fantastisme perolehan suara yang tinggi ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor diluar figur Denty, diantaranya adalah kualitas perilaku pemilih yang rendah, team pemenangan pemilu yang loyal dan handal, peran suami, keluarga besarnya dan lain-lainnya. Untuk menghadapi *stereotype* miring akan kemampuannya ini, hendaknya menjadi tantangan bagi Denty untuk membuktikan bahwa diberikannya kepercayaan lewat pemberian suara dengan angka yang fantastis kepadanya tersebut adalah betul-betul karena dirinya dipandang mampu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah pilihannya akan tuntutan kesejahteraan rakyat yang meningkat dan pelayanan publik yang berkualitas.

Gambaran perolehan suara untuk 4 (empat) anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Legislatif DPD RI Periode 2014 – 2019, tersaji dalam bentuk tabel berikut di bawah ini.

**Tabel 2.3**

**Perolehan Suara Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Jateng Dalam Pemilu Legislatif 2014**

| <b>No. Urut</b> | <b>Nama</b>                         | <b>Jumlah Suara Sah</b> | <b>Peringkat Perolehan Suara</b> | <b>Keterangan (pada saat pencalonan)</b> |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 7               | Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, SE., MH | 1.900.767               | 1                                | <i>Incumbent</i>                         |
| 27              | Drs. H. Sulistiyo, M. Pd.           | 1.224.837               | 2                                | <i>Incumbent</i>                         |
| 6               | Dr. H. Bambang Sadono, SH., MH      | 1.235.476               | 3                                | Anggota DPRD Provinsi Jateng             |
| 4               | Drs. H. Akhmad Muqowam              | 948.449                 | 4                                | Anggota DPR RI                           |

Sumber Data: KPU Jateng, 2014, diolah.

Adapun gambaran hasil perolehan suara secara keseluruhan untuk Pemilu DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah pada 9 April 2014 dapat diperoleh pada lampiran laporan penelitian ini.

## **Bab III**

### **Keterpilihan Denty Dalam Pemilu DPD – RI 2014**

Bab ini menjelaskan faktor keterpilihan Denty dalam kompetisi politik yang terjadi di Jawa Tengah. Keterpilihan Denty sebagai anggota DPD dalam Pemilu DPD – RI Tahun 2014 dengan meraup suara tertinggi dan fantastik dibandingkan dengan 3 anggota DPD lainnya dari Propinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk memudahkan dalam melakukan analisis, peneliti mengelompokkan beberapa faktor pengaruh keterpilihan Denty dalam Pemilu DPD Tahun 2014 kedalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Terhadap dua jenis kelompok faktor pengaruh tersebut kemudian akan dilakukan pembahasan atau analisis secara lebih mendalam dengan mendasarkan pada metode analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity and threat*). Metode SWOT dipilih karena merupakan salah satu alat penting yang dapat dipakai untuk melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Untuk itu maka sistematika Bab III ini akan dibagi kedalam tiga sub bab, yakni faktor internal, faktor eksternal dan analisis SWOT.

#### **3.1 Faktor Internal**

Faktor internal yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang ada dalam diri Denty yang berpengaruh terhadap keterpilihannya dalam Pemilu DPD Tahun 2014. Berdasarkan data temuan di lapangan maka

dapat disampaikan faktor keterpilihan Denty yang begitu besar di pentas kompetisi politik Jawa Tengah disebabkan karena faktor internal yang berasal dari kandidat yang mencalonkan diri dalam kompetisi politik ini, yang diantaranya meliputi beberapa elemen penting, yakni faktor teknis “figur” kandidat, faktor jaringan kandidat, faktor komitmen/kepedulian kandidat, faktor gender, dan faktor intensitas menjaga relasi.

### **3.1.1 Faktor Teknis “Figur” Kandidat**

Faktor Teknis “Figur” Kandidat yang dimaksudkan disini adalah faktor *positioning* letak foto Denty dalam Kartu Suara Pemilih. Hasil wawancara dengan para informan di lapangan menunjukkan bahwa dibandingkan dengan beberapa kandidat yang ada dalam kompetisi politik DPD 2014 ini dapat ditarik benang merah bahwa figur Denty merupakan figur yang berbeda dengan kandidat-kandidat lainnya. Yang menarik dalam perspektif informan adalah bahwa figur kandidat ini dikenal bukan karena program atau visi misi yang akan diperjuangkan jika nantinya terpilih, tetapi lebih karena faktor teknis menyangkut *positioning* “figur” kandidat dalam konteks teknis, yakni *positioning* foto kandidat yang berada di deretan paling atas dan di bagian tengah pada kartu suara pemilu yang menyebabkan foto dirinya sangat mudah dan dapat dengan cepat dilihat oleh pemilih pada saat awal membuka kartu suara pemilu. Pengambilan fokus gambar yang sedikit lebih besar ukurannya dan lebih menonjol ke depan, memperkuat *positioning* foto yang menguntungkan untuk dapat bisa lebih, mudah dan cepat terlihat dibandingkan dengan *positioning* foto kandidat lainnya. Faktor pendukung yang bersifat teknis lainnya adalah pemakaian busana muslim yang dikenakan

dengan komposisi warna dan penataan *background* yang apik serta usia paling muda dari deretan foto para kandidat di urutan teratas, sangatlah menguntungkan, karena mayoritas pemilih adalah beragama Islam dan jumlah pemilih muda pada pemilu 2014 juga cukup besar. Berkah teknis seperti ini sangat membantu bagi para pemilih yang berada dalam kelompok *floating*, bingung atau tidak memiliki *knowledge* yang cukup terhadap para calon yang maju bersaing. Data ini menjadi signifikan dan didukung oleh data survey yang dilakukan pada beberapa bulan sebelum Pemilu DPD diselenggarakan yang menunjukkan angka *floating mass* di Jawa Tengah yang cukup tinggi, yaitu sekitar 70% (Suara Merdeka, 15 Maret 2014).

Faktor teknis “figur” kandidat ini menguntungkan para calon yang berada dalam posisi strategis dalam sebuah kartu suara pemilu. Pemilih yang tidak *knowledgable* dan tidak mau repot dengan berbagai pertimbangan rasionalitas maka akan mempertimbangkan aspek teknis seperti ini sebagai *attribution* dalam proses pencoblosan. Wawancara dengan informan Suyit menegaskan hal ini. Saat disodorkan lagi Kartu Suara Pemilu DPD, beliau mengatakan pertimbangan memilih Denty, yaitu sebagai berikut:

“wong kulo niku mboten paham soal sinten sing badhe dicoblos. Wedal niku pas kulo buka kartune, foto ibu niku sing sepindah langsung saget kulo sawang. Fotone sae ngagem busono jilbab, mboten koyo konco-koncane. Yen tentang nopo niku visi misi kulo kok mboten paham”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan informan Suyit pada tanggal 2 Juni 2014 di Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung pukul 15.00 wib.

Sementara itu, informan lain, Etik, Taryadi dan Dina juga menegaskan hasil yang hampir sama bahwa ia tidak mempunyai banyak informasi bahkan tidak tahu apakah dan siapakah DPD itu, melainkan pertimbangannya yang penting datang dan mencoblos yang kira-kira gambarnya baik. Dalam pandangan informan Bu Etik yang paling penting adalah ikut berpartisipasi politik dalam pemilihan umum sehingga menjadi warganegara yang baik. Berikut hasil wawancara terhadap Etik tersebut:

“Bagi saya, yang paling penting saged tumut rame-rame dateng ke TPS membantu pemerintah dalam pemilihan umum, inggih puniko ikut mencoblos. Soal siapa yang dicoblos, terus apakah mereka mempunyai visi misi yang baik untuk masyarakat, kulo mboten ngertos. Malah dadi suwe lan mumet kesuwen wonten bilik suara milih-milih foto lan mikir sinten sing visi misine sae, ugi mboten kepenak kalih rencang-rencang sing tasih antri. Pokoknya begitu saya terima kartu suara, ingkang sepindah saged ketawis fotone nggih no 7 niku. Terus kulo sawang fotone sae, Islam ugi tasih enem, ketoke pas dan cocok, ya sudah, saya coblos mawon. Gampang lan cepet, mboten susah digawe angel-angel.<sup>7</sup>

Secara teoritik, pandangan perilaku politik pemilih berdasarkan pada teknis *positioning* “figur” dapat berpengaruh dan menentukan keterpilihan seseorang ini tidak banyak dibahas dalam perilaku pemilih baik dalam perspektif psikologi, perspektif *rational choice* maupun perspektif sosiologis. Hal ini berpotensi menjadi perilaku politik pemilih yang baru karena aspek-aspek teknis justru menentukan keterpilihan seseorang. Selama ini teori-teori perilaku di negara-negara Barat banyak menjelaskan bahwa fenomena perilaku memilih banyak disebabkan oleh alasan rasionalitas (baik psikologi, sosiologi maupun

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Etik, penduduk Kota Semarang, pada tanggal 6 Juli 2014, pukul 10.00 wib

ekonomi). Tetapi penelitian ini menemukan hal baru bahwa ada pertimbangan teknis yang menyebabkan seseorang menjatuhkan pilihan politik.

Pertimbangan-pertimbangan teknis seperti ini terjadi karena pemilih tidak memiliki cukup informasi yang bisa dipakai untuk menentukan pilihan, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesulitan akses informasi yang mudah serta berbagai keterbatasan-keterbatasan lain, seperti misalnya tidak adanya keinginan untuk mencari tahu atau mendapatkan informasi. Pemilih jenis ini adalah mereka yang mencoblos atau datang ke TPS tanpa persiapan informasi sama sekali. Perilaku politik pemilih semacam ini justru sulit ditebak dan berpotensi menghasilkan pilihan-pilihan yang mengejutkan. Pilihan-pilihan yang mengejutkan seperti ini misalnya tanpa diduga menang mutlak atau tanpa diduga pula kalah mutlak. Dalam fenomena seperti ini, keterpilihan Denty diuntungkan dengan meraup suara yang cukup fantastis.

### **3.1.2 Faktor Jaringan Kandidat**

Lagi-lagi data menunjukkan bahwa Denty tidak sebagaimana 3 kandidat terpilih lainnya yang dapat dikatakan memiliki banyak jaringan yang mempunyai ikatan psikologis dan bisa lebih mudah dan murah digerakkan untuk memberikan suara kepadanya, jika dibandingkan dengan pemilih dari masyarakat pada umumnya. Bambang Sadono adalah anggota partai Golkar, PWI, DKJT dan IKA UNDIP. Kemudian Sulistiyo juga memiliki lebih banyak lagi jaringan daripada Bambang Sadono, namun jaringan yang paling banyak jumlah massa dan relatif solid adalah keterlibatannya dalam kepengurusan organisasi guru, yaitu PGRI

(Persatuan Guru Republik Indonesia), baik pada tingkat lokal Jawa Tengah maupun nasional yang berpusat di Jakarta. Demikian pula Akhmad Muqowam yang aktif diberbagai organisasi dengan nafas Islam, khususnya organisasi politik PPP yang kemudian mengantarkannya sebagai anggota DPR-RI hingga beberapa periode (1997 hingga 2014). Dalam masyarakat yang mayoritas muslim, maka Akhmad Muqowam dapat dikatakan memiliki massa dan jaringan pendukung yang baik.

Namun demikian jaringan yang tidak sebanyak dan dikelola dengan baik sebagai sebuah organisasi massa dan politik yang dimiliki oleh ketiga kandidat lainnya, Denty memiliki jaringan yang keberadaannya lebih bukan karena dan berasal dari dirinya pribadi, namun jaringan yang ada karena faktor suami, faktor orang tua dan faktor saudara/keluarga. Jaringan yang terbentuk karena dirinya sendiri dan cukup menentukan dalam perolehan suara pemilih adalah karena faktor *incumbent*. Berikut penjelasan data dan pembahasannya.

a. Jaringan karena faktor suami

Jaringan yang dimiliki Denty adalah terkait dengan kedudukan suaminya yang seorang PNS yang pernah menjabat sebagai sekwilcam dan camat di beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung, yaitu Kecamatan Candiroto, Kecamatan Jumo, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kledung dan Kecamatan Kandangan. Artinya, sebagai pejabat tinggi di wilayah kecamatan, paling tidak dia memiliki massa di daerah yang pernah dipimpinnya. Dengan kata lain, sebagai seorang isteri sekwilcam/camat, maka akan melekat tugas dan fungsi

sebagai pendamping suami dalam mengelola masyarakatnya. Dengan demikian, ia akan memiliki kemudahan untuk melakukan kontak dan menjalin hubungan dengan masyarakat dimana dulu dia pernah bersama mereka. Kondisi jaringan tipe ini sebagaimana ditegaskan oleh informan Pak Lilik berikut ini:

“kulo nyoblos Bu Denty ingkang kulo sampun nate tepung naliko Pak Bowo ngasto Camat wonten Kandangan. Piyantun sanes ipun kulo mboten kenal. Ngeh namung niku alasan kulo nyoblos, mboten wonten alasan sanes”.<sup>8</sup>

Beberapa informan lain<sup>9</sup> juga menyampaikan alasan yang senada. Masih terkait jaringan Denty yang keberadaannya karena faktor suami, yaitu sebuah organisasi Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPK-IKAPTK), yang mana organisasi ini mewadahi para lulusan pendidikan tinggi kepamongprajaan (seperti APDN -Akademi Pemerintahan Dalam Negeri-, STPDN -Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri-, IIP -Institute Ilmu Pemerintahan-, dan IPDN -Institute Pemerintahan Dalam Negeri), yang sebagian dari mereka memiliki jabatan strategis karena memiliki akses langsung dengan masyarakat, seperti misalnya jabatan camat, sekwilcam, dan lurah. Keaktifan dan jalinan hubungan yang baik dengan organisasi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan yang dibina suaminya tersebut, memberi dampak positif bagi dirinya, yaitu walau tidak secara *explicit* Denty mendapatkan restu serta dukungan para alumni untuk kemenangan Denty

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pak Lilik, penduduk Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, pada tanggal 21 Juli 2014 pukul 11.00 wib

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Abdullah (Tembarak) dan Bu Romlah (Bulu) pada tanggal 22 Juli 2014 serta dengan Pak Samijan (Jumo) pada tanggal 23 Juli 2014

dalam Pemilu DPD.<sup>10</sup> Dukungan para alumni itu tentu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku pemilih pada keluarga dan masyarakat yang berada di wilayah dimana para alumni tersebut bekerja dan bertempat tinggal. Hal ini disebabkan budaya (politik) paternalistik yang masih ada dan hidup di masyarakat, khususnya di masyarakat yang tinggal dipinggiran (desa), dimana para elite lokal (diantaranya camat, lurah dan kades) masih menjadi panutan, termasuk dalam perilaku politik pemilih dalam Pemilu DPD.

Loyalitas, kesolidan dan integritas yang tinggi pada organisasi tersebut mampu direalisasikan, tidak saja pada pemilu DPD tahun 2009, dimana organisasi DPK-IKAPTK tersebut sebagai “kendaraan” dan mampu mengantarkan Denty lolos ke senayan sebagai anggota DPD Periode 2009 – 2014, namun juga pada Pemilu DPD tahun 2014. Meskipun ada perbedaan pola restu dan dukungan yang diberikan, yaitu jika tahun Pemilu DPD sebelumnya (2009) yang hanya ada satu calon (Denty) dari “keluarga” alumni yang maju dalam pemilu DPD, sedangkan pada tahun Pemilu DPD 2014 terdapat 2 calon (Denty dan Drs. H. Hendro Martojo, MM), maka pola dukungan yang diberikan organisasi alumni tersebut adalah dengan membebaskan anggotanya untuk memberikan dukungan atau suaranya kepada 2 kandidat tersebut. Tindakan ini sebagai wujud menjaga keutuhan, solidaritas, loyalitas dan integritas organisasi alumni pamong praja Jawa Tengah tersebut. Namun demikian, walau suara terpecah untuk 2 orang kandidat, organisasi DPK-IKAPTK ini diyakini memberikan kontribusi pada

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Informan X (nama samaran, salah seorang anggota DPK-IKAPTK) pada tanggal 21 Juli 2014 di Kabupaten Temanggung pukul 19.00 wib

perolehan suara keduanya. Kondisi seperti ini digambarkan oleh salah satu anggota organisasi DPK-IKAPTK, sebagai berikut dibawah ini:

“bagi kami, yang penting ada perwakilan dari “keluarga” alumni. Siapapun sesungguhnya tidak penting, yang penting adalah komitmen untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Hanya saja, tentu *incumbent* punya peluang yang lebih besar”.<sup>11</sup>

b. Jaringan karena faktor orang tua

Jaringan bentuk lain yang tidak kalah penting dan besar dalam mendukung perolehan suara Denty pada Pemilu DPD 2014 ini adalah faktor posisi dan peran sosial, ekonomi dan politik dari orang tua, mertua dan saudara atau keluarga besarnya. Faktor ini tidak berbeda dengan peran dan kontribusi mereka pada perolehan suara Denty di Pemilu DPD Tahun 2009. Faktor peran kemasyarakatan atau sosial yang dapat memberikan kontribusi pada perolehan suara Denty adalah dari profesi Ibundanya sebagai seorang bidan cukup populer di daerahnya. Gambaran kontribusi peran ini dapat diperoleh dari informasi yang diberikan informan Edrian, yaitu:

“ keluarga bu Denty sudah cukup dikenal di masyarakat. Dadas gampang memberikan dukungan kepada anak beliau. Apalagi keluarga bu Denty ini dipandang oleh masyarakat cukup memiliki komitmen dan kedekatan untuk membantu sesama”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Y (nama samaran), alumni APDN di Semarang, 2 Juni 2014

<sup>12</sup> Wawancara di Kedu Temanggung, 22 Juli 2014

Ibu mertuanya juga cukup populer sebagai seorang mantan guru dan kepala sekolah pada sekolah dasar teladan di Temanggung, yang aktif mengikuti perkumpulan pengajian dan olah raga untuk manula. Sering beberapa orang datang menemui beliau untuk berkonsultasi atau *sharing* karena dipandang sebagai ibu yang sukses dalam mengantarkan putra-putrinya. Dengan menggunakan nama dan peran kemasyarakatan Ibu mertuanya ini, maka orang akan mengikuti atau mengamini apa yang disampaikan beliau tentang pencalonan Denty dalam Pemilu DPD. Informan Ganis berikut ini menggambarkan kondisi tersebut.

“Bu Denty merupakan menantu bu Guru yang memiliki jaringan luas di wilayahnya. Beliau juga memiliki sikap dan dukungan yang positif untuk kemajuan masyarakat, sehingga beliau sangat disegani. Sehingga tidak sulit bagi beliau untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat”.<sup>13</sup>

Demikian pula ayah dan (almarhum) ayah mertuanya yang pernah bekerja sebagai PNS di satu instansi yang sama, yaitu Departemen Agama Kabupaten Temanggung, sebagai ulama yang dekat dengan para kyai serta aktif di perkumpulan pengajian. Ayah mertuanya juga merupakan aktivis di Partai Golkar hingga mengantarkan pada jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Peran politik dan kemasyarakatan atau sosial - religius dari orang tua dan mertuanya pada masyarakat Temanggung yang mayoritas beragama Islam ini, tentu sangat menguntungkan posisi Denty dalam upaya meraup banyak suara di Pemilu DPD, baik Periode 2009 ataupun 2014. Informan Hery memberikan penjelasan yang bermakna gambaran bagaimana kontribusi dan peran ayah dan

---

<sup>13</sup> Wawancara di Temanggung, 22 Juni 2014

ayah mertua Denty dalam mempengaruhi pemilih pada Pemilu DPD 2014, sebagai berikut:

“ ayah mertua bu Denty merupakan orang yang cukup dikenal dan bisa disebut tokoh di wilayah ini. Jadi, mboten kaget, menawi dukungan kagem bu Denty cukup kuat dari berbagai kalangan yang dulu banyak dibantu beliau. Ayah mertua beliau juga merupakan tokoh politik Golkar waktu itu yang sangat disegani”.<sup>14</sup>

Dengan demikian maka faktor jaringan yang terbentuk karena posisi suami dan orang tua serta mertuanya tersebut, menjadi sangat logis dan rasional jika di Temanggung Denty kemudian mampu meraup suara sebanyak 96.361 (25%) dari 385.126 suara sah. Jumlah suara ini jauh melebihi 3 kandidat terpilih lainnya, apalagi terhadap 28 dari jumlah total 32 orang kandidat lainnya (lihat tabel terlampir).

c. Jaringan karena faktor saudara

Menguatkan analisis di atas terkait bagaimana pengaruh jaringan yang terbangun karena faktor orang tua dan mertua terhadap keterpilihan Denty yang meraup suara sangat besar ini, adalah perolehan jumlah suara yang didapat Denty di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang (tempat asal ayah mertua dan saudaranya berdomisili) serta Kabupaten Sukoharjo (tempat asal ibunda).

Jika 3 dari 4 orang kandidat terpilih dalam Pemilu DPD 2014 dapat memperoleh suara unggul di daerah asalnya, maka kondisi ini berbeda dengan perolehan suara kandidat terpilih Akhmad Muqowan di daerah asal dan

---

<sup>14</sup> Wawancara, 6 Juli 2014.

sekitarnya, yaitu Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Tabel berikut di bawah ini menggambarkan bagaimana perolehan suara kandidat di daerah asalnya.

**Tabel 3.1**

**Perolehan Suara Kandidat Terpilih DPD 2014 Berdasarkan Daerah Asal (Kelahiran)**

| Nama Kandidat Terpilih DPD            | Daerah Asal   |               |            |           |         |              |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------|--------------|
|                                       | Muqowam       |               | Denty      |           | Bambang | Sulistiyo    |
|                                       | Kab. Semarang | Kota Salatiga | Temanggung | Sukoharjo | Blora   | Banjarnegara |
| Hj. Denty Eka Widi Pratiwi S.E., M.H. | 50.623        | 7.317         | 96.361     | 48.617    | 46.203  | 45.002       |
| Dr. H. Bambang Sadono, S.H., M.H.     | 50.353        | 6.842         | 27.164     | 26.945    | 60.052  | 28.035       |
| Dr. H. Sulistiyo, M.Pd.               | 33.318        | 5.034         | 17.001     | 35.946    | 24.652  | 72.987       |
| Drs. H. Akhmad Muqowam                | 39.728        | 3.933         | 18.140     | 30.465    | 20.921  | 26.883       |

Sumber Data: KPUD Jawa Tengah 2014, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa 3 dari 4 kandidat terpilih unggul di daerah asalnya. Hal ini secara logis dapat diterima karena secara teoritis melalui pendekatan sosiologis, perilaku politik pemilih akan dipengaruhi oleh kedekatan atau afiliasi dengan kandidat berdasarkan kesamaan asal usul. Namun data penelitian menyebutkan bahwa Denty unggul di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, walaupun dia tidak berasal dari kedua daerah tersebut. Sukses dalam mendulang suara di kedua daerah tersebut dapat disebutkan karena faktor jaringan keluarga dari ayah mertuanya yang berasal dari Suruh Salatiga, sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang. Sedangkan sebagian besar keluarga besar ayah mertuanya tinggal di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Beberapa keluarga yang tinggal di Suruh pada umumnya berprofesi sebagai pedagang grosir yang melayani penjualan partai besar kebutuhan

pokok akan pangan dan papan pada masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Suruh. Mereka juga dipandang sebagai kalangan yang kuat menjalankan kegiatan-kegiatan agamis (Islam), diantaranya dengan pemilikan dan pengelolaan yayasan pendidikan dan pondok pesantren. Profesi sebagai pedagang partai besar dan kehidupan yang religius ini cukup efektif dalam mempengaruhi atau mengarahkan perilaku politik pemilih. Nampaknya faktor dan posisi jaringan keluarga Suruh ini yang menyebabkan suara Denty unggul atas Muqowan dan bahkan atas seluruh kandidat dalam Pemilu DPD 2014. Contoh hasil wawancara yang menggambarkan kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

“ya jenenge sedulur. La yen ana sing maju soko sedulur, yo mesti kudu dibantu. Le bantu yo ora kangelan amargo toko kan akeh wong deso sing podo kulakan. Dadi gampang olehe ngarahake supoyo podo coblos Denty. Wong deso akeh manute, amargo ana hubungan utang piutang sebagai pedagang dan pembeli”.<sup>10</sup>

Beberapa pemilih toko di Suruh hampir senada menyampaikan data sebagaimana kutipan wawancara tersebut di atas.

Dari data-data tersebut di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu bahwa tidak sulit bagi Denty untuk mendapatkan suara yang besar dan fantastis tersebut, karena dukungan suami dengan jabatan sebagai mantan camat, sebagai alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan serta peran sosial, ekonomi dan politik orang tua dan keluarga besarnya yang kuat, solid, dan terintegrasi dengan baik.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Kholifah, 20 Juni 2014

d. Jaringan karena faktor *incumbent*

Hasil penelitian di lapangan telah menunjukkan bahwa jaringan kandidat juga ikut menentukan keterpilihan Denty dalam kompetisi politik DPD di Provinsi Jawa Tengah. Jika uraian di atas menggambarkan keberadaan dan kontribusi jaringan yang berasal dari luar Denty, maka yang datang dari Denty sendiri adalah jaringan yang keberadaannya karena posisi Denty sebagai *incumbent*. Sebagai *incumbent*, sedikit banyak ikut menentukan perolehan dukungan dari masyarakat pemilih. *Incumbent* memiliki kemampuan dan akses yang lebih besar dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya untuk bisa menjaga relasi dengan konstituen melalui berbagai kewenangan yang dimilikinya.

Kewenangan-kewenangan yang dimilikinya memungkinkan jaringan akses kepada konstituen tetap terjaga. Kewenangan *incumbent* yang paling penting adalah menyangkut kemampuan akses terhadap uang, fasilitas atau sumberdaya (*resources*) yang memungkinkan dimodifikasi untuk kepentingan politiknya.

Pendekatan politik melalui metode “reses” anggota DPD untuk bertemu dengan konstituen nya menjadi salah satu resep ampuh untuk menjaga ketergantungan konstituen terhadap kandidat *incumbent*. Semakin besar ketergantungan konsituen terhadap kandidat maka akan semakin besar tingkat loyalitas dukungan mereka kepada para kandidat tersebut.

Secara teoritik ini disebut sebagai relasi kleintelistik yaitu pola hubungan *patron-client relations* dimana kedua nya saling membutuhkan. Kandidat membutuhkan dukungan berupa suara dari konstituen, sementara konstituen membutuhkan dukungan program-program yang bisa membantu peningkatan keuntungan atau kesejahteraan mereka.

Observasi yang dilakukan terhadap kandidat dan tim sukses nya menunjukkan bahwa konstituen selalu diminta untuk mengajukan proposal yang dilengkapi dengan berbagai dokumen (seperti KTP atau dokumen dukungan lainnya) untuk mensukseskan kandidat. Terkait dengan hal ini, seorang informan menyatakan bahwa:

“semua permintaan proposal atau bantuan yang masuk ke Ibu Denty harus dilengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan khususnya menyangkut jumlah warga dan KTP yang harus disertakan. Meniko penting untuk memastikan bahwa bantuan Ibu benar-benar sampai ke lapangan dan diterima dengan benar. Ini juga memudahkan untuk monitoring dan evaluasi kami dalam pengelolaan pemberian bantuan kepada masyarakat”.<sup>11</sup>

Model pengelolaan bantuan semacam ini sesungguhnya bisa dipahami mengingat pemikiran umum bahwa dalam politik itu *no free lunch* (tidak ada makan siang gratis). Artinya bahwa pemberian bantuan dengan meminta imbalan dukungan adalah sesuatu yang wajar. Banyak pihak menilai ini sebagai sesuatu yang bersifat transaksional, namun juga ada pihak lain yang menilai hal ini sebagai sesuatu yang rasional juga.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan P (nama samaran, penduduk Kedu Temanggung), 22 Juli 2014

Informan Sutar, warga masyarakat yang pernah menikmati bantuan dari *incumbent* Denty menyatakan bahwa ia bisa memaklumi ketika mengajukan bantuan maka mendapatkan respon untuk memberikan dukungan politik. Ia memandang hal seperti ini merupakan hal biasa dan lazim terjadi dalam perpolitikan di Indonesia. Informan Sutar memberikan pandangannya bahwa:

“kulo mengajukan proposal bantuan kepada Ibu Denty dan diminta memenuhi persyaratan dukungan (biasanipun daftar KTP), puniko hal biasa dan lumrah. Kula ugi mboten keberatan sebab Bu Denty pasti juga membutuhkan dukungn untuk bisa terpilih kembali menjadi anggota DPD. Dados sakjane sami-sami menguntungkan, mboten wonten yang dirugikan.”<sup>12</sup>

Relasi dan upaya membangun jaringan antara kandidat dan konstituen semacam ini merupakan sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi dalam konteks politik.

### **3.1.3. Faktor Intensitas Menjaga Relasi**

Data yang didapatkan dari lapangan menggambarkan bahwa dalam menjaga relasi dengan masyarakat, terutama para tokoh yang memiliki peran dan kemampuan dalam mempengaruhi dan mengarahkan pemilih, dipertahankan dan ditingkatkan oleh Denty dengan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Dalam rangka upaya ini, terlihat kegigihan dan kekuatan (khususnya secara fisik) yang dimilikinya, sebagai seorang perempuan, diatas rata-rata pada masyarakat umumnya. Dalam waktu seminggu, keberadaannya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu

---

<sup>12</sup> Wawancara di Kledung Temanggung pada tanggal 23 Juli 2014

Senin – Jumat berada di Jakarta dan Jumat – Senin berada di Temanggung. Kondisi ini dikarenakan suami dan anak-anaknya tinggal menetap di Temanggung. Waktu 3 - 4 hari tersebut, dari Temanggung Denty lalu lalang melakukan kegiatan diberbagai kabupaten – kota yang ada di Jawa Tengah, dari jenis kegiatan yang hanya sekedar menghadiri undangan, atau melaksanakan program-program kerja yang dibawa dari Jakarta maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga kegiatan yang datang dan dirancang atas inisiatif sendiri (bersama teamnya), diantaranya dalam bentuk mengadakan atau memeriahkan dengan memberikan bantuan bersifat materiil pada berbagai lomba yang diantaranya seperti lomba senam kebugaran, lomba mewarnai gambar untuk siswa PAUD, bantuan bencana alam dan lain-lain kegiatan yang umumnya ada pengerahan massa. Semua bantuan proposal yang diberikannya, khususnya adalah pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak.

Rutinitas kegiatan-kegiatan yang memiliki kecenderungan melibatkan atau adanya pengerahan massa pada setiap Jumat – Senin itu semakin meningkat dia lakukan 1 tahun menjelang diselenggarakannya Pemilu DPD 2014. Posisi *incumbent* yang dia sandang tentu menjadi kekuatan tersendiri, karena disaat melaksanakan program kerja dan kegiatan-kegiatan, baik yang berasal atas inisiatif sendiri maupun pihak lain, adalah merupakan kesempatan emas untuk menyisipkan agenda (terselubung) pencitraan dan pesan-pesan untuk memberikan dukungan suara kepada Denty pada Pemilu DPD 2014. Hal ini sesuai dengan data hasil wawancara dengan informan Kartono sebagai berikut:

“Bu Denty kagungan dukungan ingkang kuat, sebab sudah terbukti memberikan bantuan secara berkesinambungan kepada masyarakat. Masyarakat merasa diperhatikan beliau sehingga memberikan respon positif terhadap beliau” (Wawancara, 3 Oktober 2014).

#### **3.1.4 Faktor Akses, Komitmen dan Kepedulian Kandidat**

Yang dimaksudkan faktor akses, kepedulian dan komitmen kandidat disini adalah bagaimana faktor tersebut berpengaruh terhadap keterpilihan Denty dalam Pemilu DPD Tahun 2014. Sebagai telah disebutkan di atas bahwa suami, orang tua, mertua dan saudara/ keluarga besarnya cukup memiliki peran yang baik dan kuat dalam kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan, baik yang terlembaga maupun yang lepas tanpa ikatan sebagai sebuah organisasi. Peran ini begitu besar pengaruhnya terhadap kemenangan Denty pada Pemilu DPD 2009, karena Denty memiliki akses mudah untuk masuk dan menanamkan pengaruhnya ke organisasi formal maupun informal yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan keagamaan tersebut. Demikian pula secara ekonomi, Denty dapat dimasukkan dalam keluarga yang cukup mapan. Terlebih setelah dia terpilih menjadi anggota DPD 2009, tentu secara materi ada peningkatan.

Dengan data di atas maka dapat dimaknai bahwa Denty memiliki akses materi dan non materi (modal sosial) yang cukup kuat untuk menjadi pertimbangan pemilih menjatuhkan suara kepadanya, karena dukungan dari suami dan keluarga yang secara materi maupun non materi (dukungan suami dan peran sosial yang dimiliki orang tua, mertua dan saudara, baik dalam kegiatan dan atau organisasi kemasyarakatan dan keagamaan) dapat dikatakan cukup memadai.

Berangkat dari kondisi ini maka keterpilihan Denty dapat dipengaruhi oleh pertimbangan kepemilikan akses (materi dan non materi) yang cukup kuat, sehingga yang bersangkutan dipandang sudah tidak lagi berkepentingan untuk memperkaya atau pemenuhan kebutuhan diri sendiri, melainkan sebaliknya dipandang akan dapat lebih fokus mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat melalui ketersediaannya dalam hal waktu, tenaga, pikiran dan bahkan materi, sebagaimana refleksi tugas dan kewajiban yang dituntut sebagai wakil rakyat. Dan posisi sebagai *incumbent* menguatkan kepemilikan dan kemudahan penggunaan akses untuk dapat menembus dan mempengaruhi perilaku politik pemilih. Hasil wawancara dengan informan Pak Trisno berikut di bawah ini mencerminkan kepemilikan, kemampuan dan penguasaan akses yang berpengaruh terhadap keterpilihan Denty dalam Pemilu DPD 2014.

“Bu Denty mudah ditemui dan membuka kesempatan yang luas kepada kita semua untuk mengeluh atau meminta bantuan kepada beliau baik yang berupa material maupun non material. Beliau entengan membantu kita” (Wawancara, 7 September 2014).

Makna lain yang dapat ditarik dari kepemilikan, kemampuan dan penguasaan akses tersebut dan dengan didukung posisinya sebagai *incumbent*, maka komitmen sebagai wakil rakyat dan kepedulian Denty terhadap kehidupan masyarakat mestinya dapat dijalankan atau dipenuhi dengan baik. Namun komitmen dan kepedulian yang dilakukan dirasa masih jauh dari yang seharusnya sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat karena yang (baru) bisa dilakukannya adalah lebih pada pemenuhan kebutuhan masyarakat (yang diajukan masyarakat dalam bentuk berbagai proposal bantuan

materiil), bukan pada bagaimana mencari, mengamati, mempelajari, dan mengangkat permasalahan-permasalahan masyarakat untuk dijadikan bahan kerja, misalnya dengan melakukan kerjasama dengan menggandeng berbagai pihak yang memiliki *expert* di bidangnya (misalnya perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, LSM dan lain sebagainya) untuk melakukan penelitian, pemetaan dan FGD solusi permasalahan daerah, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Komitmen dan kepedulian tentang hal ini dirasa masih jauh. Denty tidak atau belum memahami tugas dan fungsi DPD. Bantuan itu hanya sesaat dan hanya dipermukaan saja. Ibarat pepatah mengatakan “memberikan ikan bukan kailnya”. Yang mestinya lebih banyak dilakukan adalah bagaimana kerjasama antar kab – kota dan menggali permasalahan, keinginan dan harapan-harapan dari masyarakat Jawa Tengah, yang hasilnya bisa menjadi bahan dalam rapat kerja dan atau membuat program kerja yang disusun bersama anggota-anggota DPD Jawa Tengah lainnya.

Studi banding yang dilakukan relatif cukup banyak, baik melalui kunjungan kerja dalam *scope* nasional maupun internasional. Namun hasil studi banding yang seharusnya bisa untuk di *share* (baik secara langsung melalui seminar-seminar, rapat kerja, FGD dan sejenisnya atau melalui tulisan-tulisan di media massa, media *online*), untuk menyelesaikan permasalahan, untuk memberdayakan masyarakatnya, tidak banyak membawa manfaat bagi masyarakat. Jadi pola kerja dengan pemberian bantuan-bantuan (materiil) yang dilakukan lebih berpotensi hanya sebagai alat atau sarana pencitraan saja (dalam upaya kemenangan Pemilu DPD 2014).

Pola kerja Denty yang diibaratkan seperti kata pepatah *memberi ikan, bukan kailnya* itu, maka Denty sebenarnya dalam keanggotaannya sebagai wakil rakyat melalui lembaga DPD, cerminan sebagai wakil rakyat hanyalah dipermukaan saja, tidak banyak membuahkan hasil yang menggembirakan untuk kemajuan masyarakatnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut ini:

“Sebenarnya masyarakat tidak terlalu tahu tentang DPD, yang mereka tahu ya ajukan proposal, kemudian dapat dukungan terus memilih mereka. Soal bagaimana ke depan, mereka tidak banyak tahu dan tidak banyak peduli” (Wawancara, 16 Oktober 2014).

Namun kondisi atau pola kerja sebagai wakil rakyat yang ada pada Denty ini tidak berkorelasi dengan perolehan suara Denty dalam Pemilu DPD Tahun 2014 yang begitu tinggi, bahkan tertinggi dan cukup fantastis dengan mengalahkan kandidat-kandidat yang secara kasat mata diprediksi memiliki potensi besar untuk terpilih dengan mendapatkan perolehan suara yang tinggi dalam Pemilu DPD 2014 karena memiliki massa yang jelas dan besar. Tentu ada faktor lain sebagai penyebabnya, diantaranya bisa karena *team* dan strategi pemenangan, faktor internal serta eksternal figur, pendidikan serta perilaku pemilih, dan lain-lainnya.

### **3.1.5. Faktor Gender**

Dalam Pemilu DPD Tahun 2014 terdapat 8 (delapan) orang kandidat berjenis kelamin perempuan, namun dari 12 orang informan yang berjenis kelamin perempuan hanya 5 (lima) orang yang mendasarkan pertimbangan gender

dalam memberikan suaranya untuk Denty. Ke 4 (empat) orang informan tersebut senada dengan yang diucapkan informan Indah, yaitu sebagai berikut:

“Saya memilih no 7 karena alasan dia adalah perempuan. Kalau laki-laki apa mereka kepikir, paham dan mau menyuarakan kebutuhan dan keinginan-keinginan kaum hawa ini. Kalau perempuan kan beda....sesama perempuan pasti tahu lah... nantinya juga akan lebih enak dan bebas kalau mau matur sama sesama perempuan daripada sama bapak-bapak”<sup>13</sup>

Dari data hasil penelitian ini dapat disampaikan bahwa keterpilihan Denty dalam Pemilu DPD 2014 juga ada unsur pertimbangan gender, dimana pemilih menjatuhkan pilihannya karena dorongan bahwa perempuan memiliki pengetahuan lebih akan kebutuhan dan atau keinginan kaum perempuan. Perempuan juga mendapat kepercayaan berpotensi dapat mewartakan dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi kaumnya.

## **3.2 Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada diluar diri seseorang yang berpengaruh terhadap keterpilihannya dalam Pemilu. Adapun faktor eksternal yang cukup efektif menentukan keterpilihan Denty dalam kompetisi politik ini di Jawa Tengah adalah meliputi elemen-elemen sebagai berikut di bawah ini.

### **3.2.1 Faktor Media Kampanye**

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Indah (penduduk Kab. Pekalongan) pada tanggal 29 Juli 2014

Kampanye, khususnya terkait dengan figur, visi - misi dan program kerja kandidat adalah sangat diperlukan dan cukup menentukan keterpilihan kandidat dalam pemilu. Namun televisi, internet dan atau facebook yang merupakan media kampanye yang cukup menentukan dalam keterpilihan kandidat dalam pemilu tidak digunakan oleh Denty dengan pertimbangan bahwa media kampanye tersebut memerlukan dana yang besar. Adapun media kampanye yang lebih ditekankan adalah penyebaran leaflet dengan ukuran yang relatif kecil (5 x 7 Cm) dengan pertimbangan bahwa selain biaya yang murah juga mudah untuk disebar dan diberikan kepada masyarakat siapapun dan dimanapun dalam jumlah yang banyak. Namun demikian kampanye melalui media tradisional yaitu spanduk, baliho, poster, pemberian jam dinding dan paket sembako juga dilakukan, terutama di pasar-pasar tradisional.

Penekanan pembuatan dan penyebaran leaflet dengan ukuran dan jumlah yang banyak, dilakukan dan dapat dengan mudah bisa masuk hingga pelosok atau pinggiran kota. Strategi ini cukup efektif pengaruhnya bagi keterpilihan Denty dalam Pemilu DPD 2014 dibandingkan media kampanye lain yang digunakan.

### 3.2.2 Faktor Efektivitas Kampanye

Kampanye melalui sistem visitasi atau *door to door* menjadi cara sederhana tetapi efektif menghasilkan dukungan dan berpengaruh terhadap keterpilihan Denty dalam Pemilu DPD 2014. Model kampanye ini memiliki dampak yang positif dan kuat karena mampu menimbulkan keterikatan yang kuat (*strong political ties*) antara kandidat dan pemilih. Pemilih paham, ketemu dan

tahu persis kandidat, sehingga mereka memiliki hubungan keterikatan yang kuat dan efektif. Visitasi khususnya dilakukan pada orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat (seperti kepala desa, toga dan toma). Jaringan ini dibangun jauh hari, khususnya pada masa reses.

Kampanye semacam ini bukan model kampanye gembar-gembor diatas panggung, tetapi lebih kepada pendekatan-pendekatan personal yang memungkinkan terjalinnya hubungan keterikatan yang kokoh. Selain itu, model kampanye seperti ini juga efisien karena tidak banyak menghabiskan biaya-biaya operasional kampanye.

### 3.2.3 Faktor Team dan Strategi Pemenangan

Selain faktor media kampanye, kemenangan seorang kandidat juga akan ditentukan oleh faktor team pemenangan, yaitu bagaimana team kampanye itu solid dan loyal pada kandidat dengan menyusun strategik dan taktik pemenangan yang cerdas sehingga bisa berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Terkait kedua hal ini, langkah yang diambil Denty tidak berbeda dengan kesederhanaan atau bisa dikatakan bersifat tradisional dalam menentukan jenis media kampanye. Team pemenangan terdiri dari dan menggunakan pemuda - pemudi remaja Kedu (daerah atau kecamatan dimana Denty dilahirkan dan orang tuanya tinggal) yang terorganisir. Cara ini dianggap efektif dan efisien. Anak-anak muda biasanya energik dan penuh semangat. Mereka juga belum tercemari dengan pendekatan yang selalu bersifat materialistis dalam bekerja. Dia juga tidak

menggunakan konsultan politik ataupun penelitian survey untuk melihat dan melakukan pemetaan bagi pemenangan dirinya.

Adapun strategi politik yang disusun dan diterapkan adalah strategi “Makan Bubur Panas”, yaitu dengan mengolah masyarakat pinggiran melalui pemberian sembako, panggung hiburan, berbagai perlombaan dan lain sebagainya. Dengan strategi “Makan Bubur Panas” cukup berpengaruh bagi keterpilihan Denty dalam Pemilu DPD Tahun 2014, yaitu dia dapat meraup suara secara merata di semua daerah di wilayah Propinsi Jawa Tengah.

#### 3.2.4 Faktor intensitas komunikasi dengan konstituen

Kemampuan melakukan intensitas komunikasi, khususnya saat reses atau peninjauan lapangan memperkuat peluang untuk mendapat suara atau dukungan dari pemilih. Tentu hal ini menjadi kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh para *incumbent* dalam pemilu.

Intensitas komunikasi ini memungkinkan dilakukan karena dukungan posisi sebagai *incumbent* yang sudah cukup dikenal di konsitutennya. Mekanisme reses efektif dan diyakini sebagai salah satu cara bagaimana para *incumbent* memenangi pertarungan. Oleh karenanya tidak mengherankan kalau kemudian para *incumbent* umumnya sulit dikalahkan karena mereka memiliki akses yang lebih besar dibandingkan dengan kandidat-kandidat baru.

Intensitas komunikasi yang baik dibangun Denty dengan memberikan waktu 3 hari dalam setiap minggu nya untuk bertemu dan berkegiatan di beberapa wilayah daerah pemilihannya.

### 3.2.5 Faktor perilaku dan pendidikan politik pemilih yang terbatas

Keberhasilan penerapan Strategi dan Taktik “Makan Bubur Panas” ini tentu juga disebabkan oleh faktor lain, yaitu perilaku pemilih dan tingkat pendidikan pada masyarakat pinggiran (sebagai daerah yang difokuskan dan digarap oleh team pemenangan) adalah relatif rendah.

Pendidikan pemilih yang rendah atau terbatas ini membuat mereka tidak termasuk dalam kalangan pemilih kritis. Pemilih kritis adalah pemilih yang memilih kandidat karena faktor rasionalitas intelektualitas dan pemikiran matang. Pemilih dengan tingkat pendidikan rendah ini mempermudah kandidat untuk melakukan indoktrinasi atau penetrasi politik yang kuat dalam pikiran dan perasaan pemilih sehingga mereka mudah diarahkan.

Kunci utama untuk mendapatkan pemilih dengan karakteristik semacam ini adalah memegang tokoh-tokoh utama diantara mereka, sehingga mudah dalam melakukan penanaman nilai-nilai atau keyakinan politik. Tingkat pendidikan yang terbatas, daya kritis yang terbatas pula, akan memudahkan proses mempengaruhi pilihan politik seseorang. Sasaran strategi “makan Bubur Panas” pada masyarakat pinggiran dan memegang tokoh-tokoh utama nya (kepala desa, toga dan toma) adalah bukti dari bagaimana Denty dan team pemenangannya memanfaatkan kondisi masyarakat pinggiran yang merupakan masyarakat dengan perilaku dan pendidikan politik yang terbatas. Hasilnya, Denty begitu fantastik dapat meraup suara tertinggi dalam Pemilu DPD 2014.

### 3.3. Analisis Keterpilihan Denty

Pembahasan analisis keterpilihan pada bagian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi temuan-temuan hasil penelitian diatas guna kepentingan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh di lapangan maka dapat disampaikan beberapa analisis dan pembahasan penting menyangkut fokus penelitian ini berdasarkan analisis SWOT.

#### 1. Kekuatan

Kekuatan atau kelebihan yang dapat ditarik dari data terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterpilihan Denty dalam Pemilu DPD 2014 adalah:

*Pertama*, faktor figur Denty ternyata mampu dikelola secara optimal sehingga mampu menggerakkan pemilih untuk menjatuhkan pilihan pada kandidat ini. Kelebihan-kelebihan tersebut seperti misalnya menyangkut kemampuan pengelolaan *positioning* dan barangkali ada unsur “keberuntungan” foto dan nomor kandidat begitu mudah dikenali karena posisi yang begitu strategis dan membuat pemilih lebih mudah untuk ditangkap dengan mata dan akhirnya mencoblos foto tersebut.

*Kedua*, dukungan keluarga, baik suami, orang tua, mertua dan keluarga besar nya dengan peran sosial religiusnya menjadi faktor kekuatan lain yang cukup

berpengaruh bagi keterpilihan Denty dalam Pemilu DPD 2014. Hal ini bisa terjadi karena jaringan keluarga sesungguhnya sudah cukup lama bekerja membangun kohesi dan dukungan sosial yang cukup kuat. Akibat lebih jauh adalah ketika suatu saat dibutuhkan untuk kepentingan politik maka jaringan ini tinggal diaktifkan kembali. Dalam pandangan peneliti efektivitas jaringan keluarga ini memungkinkan dikembangkan untuk menunjang kepentingan-kepentingan tertentu, seperti misalnya kepentingan politik.

*Ketiga*, posisi *incumbent* dengan penguasaan akses materi dan non materi yang cukup kuat sehingga memudahkan dia dalam menjalankan komitmen dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan material. Akses terhadap sumberdaya yang dimiliki oleh *incumbent* memungkinkan dua (2) dampak politik, yakni (a) *trust* politik atau kepercayaan pemilih atau masyarakat terhadap kandidat dan (b) dukungan politik yang terus berkembang dari waktu ke waktu. *Trust* ini terjadi karena adanya harapan publik terhadap program-program yang bisa dilakukan di Jawa Tengah sehingga kredibilitas kandidat semakin meningkat di mata pemilih. Harapan publik yang berangkat dari kemampuan akses (materi dan non materi) yang dimiliki Denty sehingga Denty dinilai akan dapat bisa lebih fokus dan konsentrasi pada kepentingan-kepentingan masyarakat dan daerah yang diwakilinya daripada kepentingan diri sendiri. Efek dari ini adalah *political support* akan perlahan-lahan timbul dan melembaga terhadap kandidat yang bersangkutan.

*Keempat*, kemampuan mengelola jaringan dengan menempatkan tokoh-tokoh yang dikenal di daerah itu memberikan kesempatan yang besar atas ketersediaan

dukungan pemilih kepada kandidat secara tidak langsung. Keberadaan tokoh sebagai representasi “wakil” kandidat di daerah yang sangat dikenalnya, memudahkan kandidat tersebut mendapatkan dukungan riil dari lapangan. Hal ini menunjukkan efektivitas tokoh-tokoh yang berada di sekitar kandidat sebagai semacam “*vote getter*” untuk mendukung dan memenangkan kandidat. Dalam teori politik hal ini merupakan sesuatu yang relevan dan penting dalam mengeskloitasi dukungan-dukungan masyarakat sekitar terhadap kandidat politik tertentu. Keterwakilan tokoh-tokoh lokal tertentu memudahkan komunikasi politik antara kandidat dan pemilih sehingga efektif dalam menentukan sikap, pandangan dan dukungan politiknya.

*Kelima*, kemampuan menjaga relasi yang sudah terbangun selama ini melalui berbagai dukungan “proposal” baik yang berskala kecil atau besar memungkinkan timbulnya kepercayaan (*trust*) yang tumbuh dan berkesinambungan. Kemampuan membangun dan menjaga jaringan yang berkesinambungan ini bisa menjadi *political capital* yang kuat sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang dalam kompetisi-kompetisi politik kini dan mendatang. Investasi politik melalui ketergantungan dengan berbagai proposal yang berhasil direalisasikan menghasilkan penilaian politik yang positif terhadap sekelompok orang yang mengajukan proposal tersebut dan jugaberefek positif pula terhadap kandidat.

*Keenam*, eksploitasi dukungan melalui pemilih yang tinggal di daerah pinggiran di kawasan provinsi Jawa Tengah memberikan jaminan awal bahwa dukungan ini menjadi modal awal yang paling berguna bagi kandidat. Ketika kandidat lain sibuk menggunakan kawasan perkotaan sebagai ajang pertarungan untuk

mendapatkan pemilih, kandidat Denty mampu mengelola hal ini menjadi strategi yang efektif untuk memenangi pertarungan politik DPD. Hal ini merupakan temuan menarik karena tidak dipikirkan oleh para kandidat lain. Artinya ketika pola pertarungan politik terpusat pada daerah-daerah yang mudah dijangkau seperti di wilayah perkotaan, kandidat ini memilih kelompok masyarakat tertentu yang berada di lingkungan pinggiran dan juga pedesaan. Kelompok pinggiran atau pedesaan ini merupakan kelompok yang selama ini jarang disentuh oleh para kandidat karena berbagai keterasingan lokasi dan kesulitan akses. Justru kandidat ini berhasil mengkonversi sebagai dukungan karena masyarakat pinggiran ini merasakan sentuhan bantuan atau kepedulian dari kandidat tertentu.

## 2. Kelemahan

Adapun beberapa kelemahan besar Denty terletak pada cara-cara dan kemampuan Denty yang hanya berhasil mengelola masyarakat yang tergolong pada tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah, yang tinggal di wilayah pinggiran. Maksudnya disini bahwa Denty tidak mampu untuk berhadapan dan membangun pengaruh terhadap masyarakat menengah ke atas, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Namun demikian karena dukungan demokrasi dalam politik tidak berbasis pada kemampuan pendidikan masyarakat tetapi lebih kepada jumlah orang yang mendukung maka dalam politik merupakan sesuatu yang positif mendapatkan dukungan sekalipun mereka yang mendukung tidak jelas motivasi dan atau argumen atas dukungan tersebut. Tingkat pendidikan tidak menjadi faktor pokok yang menentukan keterpilihan kandidat, tetapi lebih kepada jumlah orang (kuantitas, bukan kualitas) yang mendukung.

Lebih dari itu adalah kelemahan Denty yang tidak memiliki pendidikan dan pengalaman politik (*political background*) serta pengalaman kerja yang cukup, merupakan faktor kendala dalam berhadapan dengan lawan-lawan ataupun rekan-rekan kerjanya sendiri di Senayan, apalagi pada periode 2014-2019 ini, 2 anggota DPD memiliki *political background* yang cukup berkualitas (Bambang Sadono dan Muqowam) dan Sulitiyo memiliki pengalaman dalam kepengurusan organisasi PGRI yang memiliki anggota yang banyak, baik di tingkat lokal dan nasional.

### 3. Peluang

Dengan dukungan suara yang begitu besar dan fantastik, jauh melebihi dari tiga (3) rekan anggota DPD terpilih lainnya, maka Denty memiliki peluang yang lebih besar dan baik untuk menjadi dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat dan daerah pemilihannya. Dukungan dan *trust* masyarakat yang diberikan kepadanya dapat dijadikan modal dan pedoman arah sikap dan tindakan untuk lebih berani dalam berpolitik di Senayan untuk memperjuangkan dan memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang berkualitas.

### 4. Ancaman

Masyarakat yang kritis dan alam atau kran demokrasi di Indonesia di era reformasi yang dibuka begitu lebarnya, dapat menjadi ancaman bagi negara dan pemerintahannya, termasuk para wakil rakyat yang duduk di parlemen. Oleh sebab itu, jika Denty yang telah diberi mandat rakyat melalui perolehan suara yang tertinggi dan sangat fantastis tersebut tidak dapat menghasilkan perubahan-

perubahan yang signifikan dengan harapan rakyat sesuai dengan peran, tugas, fungsi dan kewajiban-kewajibannya untuk upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi rakyat dan daerah pemilihannya, maka perolehan suara yang fantastik itu justru bisa menjadi *bumerang* bagi karier dan keselamatan dirinya. Ancaman ini perlu untuk dipahami dan dilakukan upaya-upaya preventif, seperti misalnya mengganti program "memberi ikan bukan kailnya" menjadi program-program yang bersifat memberdayakan partisipasi masyarakat, sehingga pada akhirnya peran Denty bisa ikut melahirkan *civil society*, khususnya pada masyarakat dan daerah pemilihannya.

## **Bab IV**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan pembahasan data lapangan sebagaimana disampaikan pada Bab III adalah bahwa keterpilihan Denty dalam Pemilu DPD Tahun 2014 dengan perolehan suara tertinggi dan fantastis dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal figur Denty yang kuat sebagai *incumbent* yang memiliki akses, komitmen dan kepedulian yang tinggi, sehingga menentukan kecenderungan pemilih untuk memberikan dukungan dan suara kepadanya.
2. Faktor internal figur Denty yang disebabkan karena bayangan figur, peran dan dukungan suami, orang tua dan mertua serta keluarga besarnya yang berujud modal kapital dan modal sosial-religius, memberi pengaruh yang besar bagi keterpilihan dirinya.

3. Pilihan media kampanye yang bersifat tradisional dan pemilihan sasaran kampanye pada masyarakat pinggiran ternyata justru menjadi langkah yang strategis, efektif dan efisien dalam meraup suara yang banyak.
4. Team pemenangan dengan menggunakan organisasi pemuda-pemudi remaja (Kedu), dengan strategi dan taktik pemenangan “Makan Bubur Panas” merupakan pilihan yang cerdas, loyal, murah dan solid.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas dapat diberikan masukan, yaitu bahwa sebagai wakil rakyat, dalam menjalankan tugas hendaknya tidak sekedar untuk pencitraan guna kepentingan pribadi untuk mendapatkan dukungan suara. Namun ada tugas, fungsi dan kewajiban yang utama dan penting, yaitu kedudukannya sebagai representasi masyarakat (*regional representatif*).

Era reformasi yang mampu mengubah masyarakat yang pasif karena terbelenggu oleh rantai kekuasaan Orde Baru yang sangat kuat menjadi masyarakat yang aktif, berani dan kritis. Disatu sisi, situasi ini dapat membawa atau menciptakan alam yang kondusif bagi

tumbuh dan berkembangnya kehidupan yang demokratis. Namun disisi lain bisa menjadikan situasi dan kondisi yang *chaos* saat kepentingan dan harapan rakyat tidak dapat dipenuhi oleh negara dan pemerintahannya, khususnya oleh wakil-wakil rakyat yang tidak atau gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai *representasi* dari rakyat. Oleh sebab itu, Denty yang mendapatkan dukungan dan suara tertinggi dan fantastik dalam Pemilu DPD 2014, jangan cepat dan mudah bangga, namun sedini mungkin justru harus menyikapi kemungkinan kondisi terburuk itu terjadi, diantaranya dengan belajar, mengerti, memahami dan melaksanakan peran, tugas, fungsi dan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota DPD, wakil rakyat dan daerah pemilihannya, sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

Lebih lanjut dalam konteks penelitian ini, diperlukan penelitian lebih lanjut menyangkut studi tentang keberlangsungan dukungan politik. Pertanyaan utama yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah keberlangsungan dukungan politik terhadap *incumbent* bisa berlangsung lama, hingga seberapa lamakah hal seperti ini bisa terjadi.

Apakah memungkinkan terjadinya pengalihan dukungan politik pada masa-masa mendatang, merupakan konsen penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut.

Agenda riset menyangkut perilaku pemilih masyarakat pinggiran juga merupakan kajian penting yang perlu dilakukan pada masa-masa yang akan datang. Kajian tentang perilaku masyarakat pinggiran ini akan memperkaya analisis mengenai berbagai studi atau teori tentang perilaku pemilih baik dari aspek psikologi, ekonomi maupun sosiologi.

## Daftar Pustaka

### a. Buku

Adman Nursal. (2004), *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Carapedia, *Hukum&Politik, Sistem Pemerintahan Amerika Serikat*, diunduh 29 – Agustus -2012 jam 10.34

Firmanzah. (2007), *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Kavanagh (1983), *Political Science and Political Behavior*, Allen & Unwin, 1983

Sanit, Arbi, (1985), *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

MPR:”*Panduan Pemasyarakatan UUD Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*”, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012: 122).

### b. Internet:

Adlin, S., Sos., M.Si, *Survey Politik dan Keputusan Maju Dalam Pilkada*, Riau Research Centre, 2009, <http://riauresearchcentre.blogspot.com>

Qodari, Muhammad: “Siap-siap Gubernur Jakarta 2007”, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=142564>

Syarir Karim, “Fenomena Perwakilan Politik Di Indonesia, Minggu 31 Oktober 2010, diunduh tanggal 20 April 2012, jam 10.00

[http://www.jpnn.com/read /2012/04/13/ 124128/syarat-jadi-anggota-DPD-makin-berat](http://www.jpnn.com/read/2012/04/13/124128/syarat-jadi-anggota-DPD-makin-berat), diunduh pada tanggal 22 Juli 2012, jam 21.00)

<http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/04/pengertian-negara-menurut-kamus-besar.html>, diunduh Sabtu, 29 Juli 2012, Jam 13.19 WIB

<http://ppejawa.com/ekoregion/kultur-2/dan> [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php? tabel=1&id\\_subyek=12,](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=12)

[http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com\\_content&view=section&id=13&Itemid=2](http://jateng.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=section&id=13&Itemid=2)

[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&id\\_subyek=12](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=12)

<http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203300JaTeng.pdf>

<http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203300JaTeng.pdf>

<http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-jawa-tengah/pariwisata>

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=142564>

<http://riauresearchcentre.blogspot.com>